

**SKRIPSI**

**PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DENGAN  
MENGUNAKAN APLIKASI SAIBA PADA KANTOR  
OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR**

**MUTMAINNA**

**10573 04326 13**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**MAKASSAR**

**2017**

**PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DENGAN  
MENGUNAKAN APLIKASI SAIBA PADA KANTOR  
OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR**

**MUTMAINNA**

**1057 3043 2613**

**Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada  
Jurusan Akuntansi**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**MAKASSAR**

**2017**

## HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL  
DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI SAIBA  
PADA KANTOR OTORITAS PELABUHAN  
UTAMA MAKASSAR  
NAMA MAHASISWA : MUTMAINNA  
NOMOR STAMBUK : 10573 04326 13  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
JENJANG STUDI : STRATA SATU (S-1)  
PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Menyatakan skripsi ini telah diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji  
Skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah  
Makassar pada hari Sabtu, 14 Oktober 2017.

MAKASSAR, 14 Oktober 2017

Menyetujui

Pembimbing I

**Drs. Asdi, MM**  
NIDN. 0026126103

Pembimbing II

**Mukminati Ridwan, SE., M.Si**  
NIDN. 0919017901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

**Ismail Rasulong, SE., MM**  
NBM. 903078

Ketua Jurusan Akuntansi

**Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak. CA**  
NBM.1073428

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama MUTMAINNA, NIM 10573 04326 13 ini telah diperiksa dan diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor SK Tahun 1439 H/ 2017 M dan telah dipertahankan di depan penguji pada hari Sabtu, 14 Oktober 2017 M. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

24 Muharram 1439 H

Makassar, .....

14 Oktober 2017 M.

Panitia Ujian :

1. Pengawas Umum: Dr. H. Rahman Rahim, SE.,MM (.....)  
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua: Ismail Rasulong, SE.,MM (.....)  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris: Drs. H. Sultan Sarda, SE., M.Si (.....)  
(Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji:
  - a. Dr. Hj. Ruliaty,MM (.....)
  - b. Muchriana Muchran, SE.,M.Si. Ak., CA (.....)
  - c. Linda Arisanty, SE.,M.Si. Ak (.....)
  - d. Asriati, SE.,M.Si (.....)

## **MOTTO**

*“Dengan ilmu hidup akan jadi lebih bermakna,  
dengan seni hidup akan terasa lebih berwarna  
dan dengan agama, hidup akan jadi lebih terarah”*

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini aku persembahkan sebagai tanda cinta dan sayangku kepada kedua Orang tua ku, kakak dan adik ku yang telah menjadi motivasi, inspirasi serta dukungan do'anya yang tiada henti untukku.*

## **ABSTRAK**

**Mutmainna, 2017.** Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaL Dengan Menggunakan Aplikasi SAIBA Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Dibimbing oleh Bapak Asdi dan Ibu Mukminati Ridwan, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi berbasis akruaL dengan menggunakan aplikasi SAIBA pada kantor otoritas pelabuhan utama Makassar, dengan menjaring 2 orang sebagai informan kunci sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, observasi dan wawancara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan variabel penelitian pada aspek pemahaman secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar telah menerapkan dan melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akruaL. Penerapan akuntansi berbasis akruaL dengan menggunakan aplikasi SAIBA pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, dilakukan secara komputerasi berjalan dengan baik dan lancar. Laporan Keuangan yang dihasilkan dengan basis akruaL memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan, yaitu dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif, tidak hanya dalam capaian realisasi anggaran namun juga data yang dihasilkan merupakan data yang lebih valid.

**Kata Kunci :** Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Basis AkruaL, dan Aplikasi SAIBA.

## ABSTRACT

**Mutmainna, 2017.** Implementation of Accrual Based Accounting Using SAIBA Applications At the Main Port Authority of Makassar Office, Guided by Mr. Asdi and Mrs. Mukminati Ridwan, Accounting Department Faculty of Economics and Business Universitas Muhammadiyah Makassar

The purpose of this study is to know how the application of accrual-based accounting by using SAIBA application at Makassar main port authority office, by capturing 2 people as key informant while data collection technique using documentation, observation and interview technique.

The method used in this research is descriptive qualitative research method that is describing the research variables on the aspects of understanding qualitatively.

The results showed that the Makassar Port Authority Office has implemented and implemented Accounting Standards Government (SAP) based on accruals. Implementation of accrual basis accounting using SAIBA application at Makassar Port Authority Authority Office, conducted by computerized running well and smoothly. The financial statements generated on an accrual basis provide better benefits to stakeholders, both the users and the auditors of financial statements, which can provide more comprehensive information, not only in the realization of the budget but also the resulting data is more valid data.

**Keywords:** Government Accounting Standards (SAP), Accrual Bases, and SAIBA Applications.



## **KATA PENGANTAR**

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang sentiasa memberikan Rahmat dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir belajar dan syarat guna memperoleh derajat serjana S-1 pada program Sarjana Ekonomi pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang berjudul “Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Dengan Menggunakan Aplikasi Saiba Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar”.

Banyak hikmah dan pengalaman berharga yang dapat menjadi pelajaran bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun tidak sedikit pula hambatan dan kesulitan yang penulis alami. Berkat ketabahan, kesabaran, keiklasan, kerjakeras, ketekunan serta kemauan besar yang disertai do'a dan bantuan serta motivasi dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Karena itu dalam kesempatan ini penulis menghaturkan penghargaan dan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dan seluruh staf kariawan.

3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak. CA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dan seluruh staf dosen.
4. Bapak Drs. Asdi, MM., selaku pembimbing I dan Ibu Mukminati Ridwan, SE., M.Si., selaku pembimbing II yang dengan setia memberikan arahan masukan serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Terima kasih tak terhingga kepada kepala pimpinan Bapak Ir. Rahmatullah, M.Si dan staf karyawan dinas perhubungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian.
6. Terkhusus kepada kak Andre, kak Eko, kak Pipit dan seluruh pegawai sub bagian keuangan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar yang telah membantu dalam proses pengumpulan data selama penelitian berlangsung.
7. Untuk keluarga besar akuntansi 7-13 yang selalu memberikan semangat dan setia bersama dalam menyelesaikan studi ini.
8. Kakakku Ishak, Ibrahim, Khumaerah, Nurhidayah, dan kedua adikku Mustakim, dan Muttahara yang selalu menyemangati ku dan mendukung ku dalam setiap langkah ku untuk menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus kepada orang tua ku tercinta ayahanda Muh. Sabir (almarhum) dan Ibunda Naima yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayangnya serta keiklasan dalam mendidik dan mendo'akan ananda sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, membalas jasa atas segala bantuan dan dorongan yang telah penulis dapatkan dari pihak-pihak tersebut diatas.

Penulis menyadari bahwa sebagai hamba Allah SWT, tidak akan terlepas dari segala kekhilafan serta segala keterbatasan, olehnya itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini bermamfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Makassar, Oktober 2017

**Penyusun**

**Mutmainna**

## DAFTAR ISI

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....          | i   |
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....           | ii  |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....     | iii |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....      | iv  |
| <b>MOTTO</b> .....                   | v   |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....             | vi  |
| <b>ABSTRAK</b> .....                 | vii |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....          | ix  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....              | xii |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....            | xiv |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....           | xv  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....         | xvi |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....       | 1   |
| A. Latar Belakang .....              | 1   |
| B. Rumusan Masalah .....             | 5   |
| C. Tujuan Penelitian .....           | 5   |
| D. Manfaat Penelitian .....          | 6   |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> ..... | 7   |
| A. Akuntansi Berbasis AkruaI .....   | 7   |

|  |           |
|--|-----------|
| 1. Pengertian Basis AkruaI .....                                   | 7         |
| 2. Kelebihan Dan Kelemahan Basis AkruaI.....                       | 7         |
| 3. Manfaat Akuntansi Berbasis AkruaI .....                         | 8         |
| 4. Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI.....                        | 9         |
| B. Standar Akuntansi Pemerintahan .....                            | 10        |
| 1. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan .....                 | 10        |
| 2. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI .....            | 11        |
| 3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI .....    | 16        |
| C. Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (Aplikasi SAIBA)..... | 17        |
| D. Penelitian Terdahulu .....                                      | 22        |
| E. Kerangka Pikir .....  | 25        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                             | <b>27</b> |
| A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....                               | 27        |
| B. Metode Pengumpulan Data.....                                    | 27        |
| C. Jenis dan Sumber Data .....                                     | 28        |
| D. Informan Penelitian.....  | 28        |
| E. Metode Analisis .....   | 29        |
| F. Defenisi Operasional Variabel .....                             | 29        |
| <b>BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>                 | <b>30</b> |
| A. Sejarah Singkat Kantor Ototitas Pelabuhan Utama Makassar .....  | 30        |
| B. Visi Dan Misi Organisasi .....                                  | 32        |
| C. Struktur Organisasi .....                                       | 33        |
| D. Kegiatan Usaha .....  | 34        |
| <b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                 | <b>40</b> |
| A. Hasil penelitian.....   | 40        |
| 1. Data Informan Penelitian .....                                  | 40        |

|  |           |
|--|-----------|
| 2. Deskripsi Hasil Penelitian .....  | 41        |
| B. Pembahasan.....   | 46        |
| 1. Penerapan Pelaporan Keuangan Dengan Menggunakan Basis<br>Akrual Terkomputerisasi Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama<br>Makassar ..... | 46        |
| 2. Aplikasi Dalam Menyusun Laporan Keuangan Basis Akrual .....   | 49        |
| 3. Komponen Laporan Keuangan .....   | 55        |
| <b>BAB VI KESIMPULAN DAN PENUTUP .....</b>   | <b>72</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 72        |
| B. Saran .....   | 73        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>74</b> |
| Riwayat Hidup .....  | 76        |
| <b>LAMPIRAN</b>  |           |

## Daftar Tabel

| <b>Tabel</b> | <b>Keterangan</b>  | <b>Halaman</b> |
|--------------|--|----------------|
| Tabel 1.     | Penelitian Terdahulu .....   | 22             |
| Tabel 2.     | Data kunjungan Kapal ( <i>Ships Call</i> ) dan <i>Gross Ton</i> (GT) ..... | 35             |
| Tabel 3.     | Data Bongkar Muat Dipelabuhan Makassar .....                               | 37             |
| Tabel 4.     | Data Arus Penumpang di Pelabuhan Makassar .....                            | 39             |
| Tabel 5.     | Data Informan Penelitian .....   | 40             |
| Tabel 6.     | Format Laporan Realisasi Anggaran (LRA) .....                              | 57             |
| Tabel 7.     | Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).....                 | 59             |
| Tabel 8.     | Format Neraca .....  | 61             |
| Tabel 9.     | Format Laporan Operasional (LO) .....                                      | 62             |
| Tabel 10.    | Format Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) .....                               | 65             |
| Tabel 11.    | Format Laporan Arus Kas .....  | 67             |

## Daftar Gambar

| <b>Gambar</b> | <b>Keterangan</b>                                   | <b>Halaman</b> |
|---------------|---|----------------|
| Gambar 1.     | Kerangka Pikir.....                                 | 26             |
| Gambar 2.     | Struktur Organisasi.....                            | 33             |
| Gambar 3.     | Tampilan Awal Pada Aplikasi SAIBA .....             | 51             |
| Gambar 4.     | Tampilan Menu Tabel Referensi .....                 | 51             |
| Gambar 5.     | Tampilan Buku Besar Akrual .....                    | 52             |
| Gambar 6.     | Tampilan Pada Menu Transaksi .....                  | 53             |
| Gambar 7.     | Tampilan Untuk Proses Posting .....                 | 53             |
| Gambar 8.     | Tampilan Untuk Menu Laporan .....                   | 54             |
| Gambar 9.     | Tampilan Daftar Surat Perintah Membayar (SPM) ..... | 55             |



## Daftar Lampiran

| <b>Lampiran</b> | <b>Keterangan</b>  | <b>Halaman</b> |
|-----------------|--|----------------|
| Lampiran 1.     | Kisi-Kisi Instrumen Penelitian .....   | 77             |
| Lampiran 2.     | Checklist Observasi dan Pedoman Wawancara .....  | 78             |
| Lampiran 3.     | Checklist Hasil Observasi .....  | 81             |
| Lampiran 4.     | Transkrip Wawancara.....   | 82             |
| Lampiran 5.     | Foto Dokumentasi.....  | 88             |
| Lampiran 6.     | Surat Permohonan Pengajuan Judul .....   | 91             |
| Lampiran 7.     | Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi .....                                | 92             |
| Lampiran 8.     | Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Fakultas .....                                       | 93             |
| Lampiran 9.     | Surat Permohonan Izin Penelitian Dari LP3M .....   | 94             |
| Lampiran 10.    | Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal dan<br>Pelayanan Terpadu Satu Pintu ..... | 95             |
| Lampiran 11.    | Surat Balasan Izin Penelitian Dari Kantor Otoritas Pelabuhan<br>Utama Makassar .....       | 96             |
| Lampiran 12.    | Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian .....                                       | 97             |
| Lampiran 13.    | Buku Kontrol Bimbingan Skripsi .....   | 98             |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perubahan dalam sistem pengelolaan keuangan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam satu dasa warsa terakhir seiring dengan tuntutan akan peningkatan kualitas laporan keuangan demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Berbagai penyesuaian penatausahaan dilakukan demi mendukung perubahan tersebut. Salah satu kunci dalam perubahan tersebut adalah dikembangkannya kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat termasuk didalamnya lingkungan kementerian perhubungan, maupun pemerintah daerah.

Untuk mengelolah pemerintahan dengan baik, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu memiliki kewenangan yang jelas dalam pengelolaan keuangan. Salah satu kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah kewenangan untuk mengelola keuangan sendiri, serta menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam menyusun dan

menyajikan laporan keuangan yang mempunyai pilihan dua basis, yaitu SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas menuju akrual. Penerapan SAP berbasis akrual dalam lingkungan pemerintahan adalah untuk mengetahui seberapa besarnya biaya yang diperlukan untuk menghasilkan pelayanan untuk kepentingan publik, serta menentukan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Dengan adanya SAP berbasis akrual ini dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan pemerintah yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami untuk pengambilan suatu keputusan baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual. Kemudian direvisi tahun 2015, kantor instansi pemerintah mengikuti penyusunan laporan keuangan berbasis akrual diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja.

Basis akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang dianut oleh suatu entitas, yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui/dicatat dalam suatu sistem pelaporan keuangan. Secara umum terdapat dua basis akuntansi, yaitu akuntansi basis kas (*cash basis*) dan akuntansi basis akrual

(*accrual basis*) yang digunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, serta menggunakan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.

Akuntansi berbasis kas adalah suatu basis akuntansi yang mengakui transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya pada saat terjadinya kas masuk dan kas dan kas keluar, serta diukur berdasarkan kas masuk dan kas keluar. Sedangkan akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi yang mengakui, mencatat dan menyajikan transaksi serta peristiwa lainnya dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Penerapan basis akrual dalam sistem akuntansi pemerintah di Indonesia merupakan amanat undang-undang yang mengatur tentang keuangan negara, sehingga basis akrual pada akhirnya diterapkan bagi seluruh entitas pelaporan dan entitas akuntansi baik pada level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar sebagai salah satu unit pelayanan kepelabuhanan dalam lingkup kementerian perhubungan juga dituntut harus mengikuti aturan dalam bidang keuangan yang ditetapkan dan dimintai pertanggungjawaban oleh Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 mewajibkan menyelenggarakan akuntansi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 tahun 2016 juga wajib menyelenggarakan akuntansi di Lingkungan Kementerian Perhubungan Unit Pemerintah yaitu dengan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan berupa laporan keuangan akuntansi berbasis akrual.

Banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual karena ada beberapa hal yang dapat menjadi hambatan atau kendala. Kompleksitas akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu hal yang dapat menjadi hambatan dan menjadi salah satu alasan timbulnya penolakan terhadap perubahan basis akuntansi. Hal yang sama juga terjadi pada saat perubahan dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis kas menuju akrual pada tahun 2005 lalu. Diperlukan waktu bertahun-tahun bagi instansi pemerintah pusat untuk beradaptasi terhadap perubahan tersebut

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagai barisan terdepan dalam implementasi akuntansi berbasis akrual telah merancang aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual (aplikasi SAIBA), yang digunakan dalam penyusunan Laporan keuangan berbasis akrual di mulai sejak bulan Januari 2015.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut maka dalam lingkungan Kementerian Perhubungan memiliki kewajiban untuk menyusun tujuh laporan keuangan, seperti : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu “Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Dengan Menggunakan Aplikasi SAIBA Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar”.

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang penulis angkat adalah : bagaimana Penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan pengembangan dan penerapan akuntansi berbasis akrual pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar
- b. Sebagai bahan informasi bagi pegawai sub bagian keuangan yang dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.
- c. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lainnya dan dapat digunakan sebagai rujukan atau referensi yang relevan dengan penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Akuntansi Berbasis Akrua**

##### 1. Pengetian Basis Akrua

Berikut ini pengertian basis akrua sebagai berikut :

“Basis akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (Mursyidi, 61 : 2009)”.

Sistem akuntansi ini merupakan sistem yang paling *modest*. Keberhasilan New Zealand menerapkan akuntansi akrua telah menyebabkan berbagai perubahan dalam manajemen sektor publik. Dalam akuntansi akrua, informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang rinci mengenai aset dan kewajiban (Nunuy Nur Afiah, 23 : 2010).

##### 2. Kelebihan dan Kelemahan Basis Akrua

Bastian (118-119 : 2010) menyatakan bahwa keuntungan basis akrua dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Penerimaan dan pengeluaran dalam laporan operasional berhubungan dengan penerimaan dan pemasukannya, yang berarti bahwa basis



akrual memberikan alat ukur untuk barang dan jasa yang dikonsumsi, diubah, dan diperoleh.

- b. Basis akrual menunjukkan gambaran pendapatan. Perubahan harga, pendapatan yang diperoleh dalam basis akrual, dan besarnya biaya historis adalah alat ukur kinerja yang dapat diterima.
- c. Basis akrual dapat dijadikan sebagai alat ukur modal .

Selanjutnya Bastian (120 : 2010) menyatakan beberapa masalah aplikasi basis akrual yang dapat diidentifikasi antara lain :

- a. Penentuan pos dan besaran transaksi yang dicatat dalam jurnal dilakukan oleh individu yang mencatat.
- b. Relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan nilai historis dan inflasi.
- c. Dalam perbandingan dengan basis kas, penyesuaian akrual membutuhkan prosedur administrasi yang lebih rumit, sehingga biaya administrasi menjadi lebih mahal.
- d. Peluang manipulasi keuangan yang sulit dikendalikan.

### 3. Manfaat Akuntansi berbasis Akrual

Secara umum, pemerintah Indonesia menerapkan basis akuntansi akrual karena basis akrual memiliki manfaat sebagai berikut (Anonim, 11 : 2014) :

- a. Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah.

- b. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah.
- c. Bermanfaat dalam mnegevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

#### 4. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua

Langkah-langkah penerapan akuntansi berbasis akrual di Indonesia sebagai berikut (Anonim, 12 : 2014):

- a. Menyiapkan pedoman kebijakan umum pada tingkat nasional tentang akuntansi akrual : PMK 238/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat (PUSAP).
- b. Menyiapkan modul pada tingkat nasional yang dapat digunakan oleh berbagai pihak dalam rangka pelatihan akuntansi berbasis akrual.
- c. Menentukan daerah percontohan di setiap regional sebagai upaya menciptakan *benchmarking*.
- d. Diseminasi/sosialisasi tingkat nasional.

Entitas pelaporan diperkenankan untuk menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual (*fully accrual basis*), baik dalam pengakuan pendapatan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana (Mursyidi, 61 : 2009).

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas mewajibkan laporan demikian. Basis akrual, untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara atau entitas pelaporan. Basis akrual untuk neraca, berarti aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya kas, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (KSAP, 2012).

## **B. Standar Akuntansi Pemerintahan**

Untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan akuntansi, dan audit di pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemda di Republik Indonesia, diperlukan sebuah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang kredibel yang dibentuk oleh sebuah komite SAP (Nordriawan dkk, 120-121 : 2012).

### **1. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa:

“Standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (KSAP, 2012)”.

Akuntansi pemerintah di Indonesia dilandasi dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), yang disertai dengan pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP), buletin teknis (bultek) dan jika memungkinkan disertai juga interpretasinya. SAP dikukuhkan dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan (Mursyidi, 21 : 2009).

## 2. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa :

Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD (KSAP, 2012).

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dalam kerangka konseptualnya

menjelaskan ada dua entitas dalam pelaksanaan akuntansi pada pemerintah yaitu: entitas akuntansi dan entitas pelaporan (Tanjung, 2 : 2015).

Adapun laporan keuangan dan karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah sebagai berikut :

Laporan keuangan pokok menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 terdiri dari (KSAP, 2012):

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan basis akrual dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih baik bagi para pemangku kepentingan baik para pengguna laporan keuangan dibandingkan dengan basis kas menuju akrual yang selama ini dianut. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu pengungkapan paripurna atau *ful disclosure* (Anonim. 3 : 2014).

Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan

pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki (Mahsun dkk, 35-36 : 2015) :

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dilakukan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan akan bercirikan memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu dan lengkap.

b. Andal

1) Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2) Dapat diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat di uji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

### 3) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

#### c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

#### d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 lampiran I Standar akuntansi Pemerintahan berbasis akrual terdiri dari (KSAP, 2012) :

- a. Lampiran I. 01 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
- b. Lampiran I. 02. PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
- c. Lampiran I. 03. PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
- d. Lampiran I. 04. PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas
- e. Lampiran I. 05. PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan
- f. Lampiran I. 06. PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan
- g. Lampiran I. 07. PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi
- h. Lampiran I. 08. PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap
- i. Lampiran I. 09. PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
- j. Lampiran I. 10. PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban
- k. Lampiran I. 11. PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan
- l. Lampiran I. 12. PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian
- m. Lampiran I. 13. PSAP 12 tentang Laporan Operasional



### 3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa : Penerapan SAP Berbasis Akrua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua menjadi penerapan SAP Berbasis Akrua (KSAP, 2012).

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas (Nordiawan dkk, 131 : 2012):

#### a. Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antarunit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh.

#### b. Asumsi Kestinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan

tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

c. Asumsi Keteraturan dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

SAP diterapkan dilingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemda dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah (Nordiawan dkk, 123 : 2012)

Keterbatasan dari penerapan SAP akan dinyatakan secara eksplisit pada setiap standar yang diterbitkan (IKAPI, 12 : 2009).

### **C. Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (aplikasi SAIBA)**

Untuk mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis akrual di pemerintah pusat, Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengembangkan aplikasi akuntansi yang selama ini telah digunakan dalam basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) yaitu Sistem Akuntansi Instansi menjadi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI. Pengembangan SAI menjadi SAIBA merupakan terobosan aplikasi akuntansi berbasis akrual yang diharapkan memenuhi kebutuhan informasi laporan keuangan yang diisyaratkan oleh standar akuntansi

pemerintahan (SAP). SAIBA dibangun sedemikian rupa sehingga diharapkan operator SAI (SAK dan SIMAK-BMN) tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan aplikasi SAIBA (Anonim, 3 : 2014).

Berikut ini merupakan penjelasan atau uraian dari masing-masing komponen laporan keuangan pokok, sebagai berikut :

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintahan pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, *surplus*/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya, selain itu laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyediakan laporan secara komparatif (Anonim, 16 : 2014).

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL hanya disajikan oleh bendahara umum negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi. Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun struktur dan isi dari Laporan Perubahan SAL yaitu : saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain, saldo anggaran lebih akhir (Anonim, 17 : 2014).

c. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menyajikan posisi keuangan pemerintah pada tanggal tertentu (Anonim, 2 : 2007). Laporan keuangan yang dimaksud menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah pada tanggal tertentu. Adapun struktur dan isi dari neraca yaitu : kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, ekuitas (Anonim, 18 : 2014).

d. Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Adapun struktur dan isi laporan operasional yaitu : pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, surplus/defisit-LO (Anonim, 19 : 2014).

e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Adapun struktur dan isi dari laporan perubahan ekuitas yaitu : ekuitas awal, *surplus*/defisit pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, ekuitas akhir (Anonim, 21 : 2014).

f. Laporan Arus Kas (LAK);

Laporan ekuitas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Penyajian laporan arus kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 03 Tentang Arus Kas (KSAP, 2012).

g. CaLK

Catatan atas laporan keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan dan oleh karenanya setiap entitas pelaporan diharuskan menyajikan Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan bertujuan untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah (Anonim, 22 : 2014).

#### D. Penelitian Terdahulu

Adapun penjelasan penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel 1.

Penelitian Terdahulu

| Nama Peneliti dan Tahun Penelitian | Judul   | Metode Penelitian   | Hasil   |
|------------------------------------|---|---|---|
| 1.Ahdony Asfiansyah/ 2015          | Strategi Implementasi Akuntansi Akrual Pada Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota “S”)                  | Pengumpulan data studi kasus ini menggunakan teknik wawancara mendalam ( <i>in depth interview</i> ), kuesioner dan studi dokumentasi ( <i>study of document</i> ). | Matriks EFAS – IFAS menunjukkan bahwa factor internal (kekuatan – kelemahan) yang dimiliki oleh pemerintah kota “S”   |
| 2.Friska Langelo, dkk / 2015       | Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung | Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Data diperoleh melalui studi lapangan.  | Menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bitung belum menerapkan PP No.71 tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan PP No.24 Tahun 2005 yaitu menggunakan basis kas menuju akrual. |

|                           |   |  |   |
|---------------------------|---|--|---|
|                           |   |  | .   |
| 3. Anggi Rizkianci / 2010 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau | Metode pengambilan sampel menggunakan Rumus slovin. Pengumpulan data menggunakan survei kuesioner. | Menunjukkan bahwa pelatihan, sumber daya manusia, komitmen organisasi dan teknologi informasi secara simultan berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI.             |
| 4. Fadilah Madjid / 2016  | Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI di Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros)  | Model pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Penelitian survey.            | Menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntansi akruaI di pemerintah daerah sudah sangat baik. Khususnya tingkat implementasi akuntansi akruaI dipengaruhi oleh ketersediaan sistem informasi serta kualitas sumber daya manusia. |
| 5. Ida Najati, dkk / 2016 | Implementasi Berbasis AkruaI : Pengujian Determinan dan   | Analisis data yang digunakan dalam penelitian  | Menunjukkan penggunaan aplikasi saiba tidak berpengaruh terhadap  |



|                               |  |   |   |
|-------------------------------|--|---|---|
|                               | Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga.  | ini adalah second order <i>Confirmatory factor analysis</i> dengan bantuan program smartpls versi 2.0                             | implementasi akuntansi berbasis akrual, sedangkan budaya organisasi berpengaruh terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual, selain itu implementasi akuntansi berbasis akrual mempunyai implikasi terhadap kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). |
| 6.Lilina Novianty Sari / 2016 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bintan. | Jenis data adalah data primer. Metode pengambilan sampel menggunakan Rumus slovin. Pengumpulan data menggunakan survei kuesioner. | Menunjukkan bahwa komitmen, kesiapan sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem informasi secara simultan berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.   |

## E. Kerangka Pikir

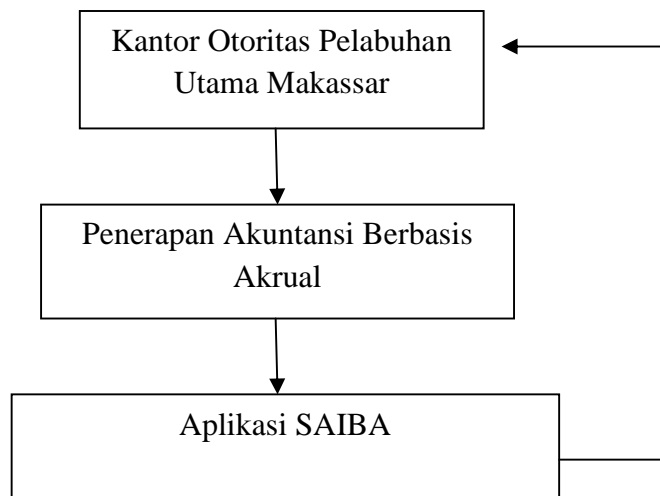
Kantor Otoritas Pelabuhan di wilayah IV Makassar ada untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan baru di pelabuhan yang merupakan amanat UU No 17/2008 tentang Pelayaran. Kantor OP di naungi oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Kementerian Perhubungan. Akuntansi pemerintahan sebenarnya berinduk pada kata akuntansi yang mengharuskan adanya suatu proses berupa siklus akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan, sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI secara bertahap dilakukan dengan memperhatikan urutan persiapan dan ruang lingkup pelaporan. Dalam upaya menerapkan basis akruaI sistem akuntansi dimodifikasi menjadi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (aplikasi SAIBA).

Aplikasi SAIBA merupakan *software* yang dirancang sebagai sistem akuntansi keuangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akruaI. Maka laporan keuangan aplikasi SAIBA berpedoman pada Laporan Keuangan Berbasis AkruaI.

Adapun kerangka pikir penelitian ini sebagai berikut :

Gambat 1.  
Kerangka Pikir



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi penelitian yakni pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Jalan Madura No.1 di kota Makassar.

Sedangkan waktu penelitian ini dilaksanakan kurang lebih satu bulan yaitu pada tanggal 20 April s/d 20 Mei 2017.

##### **B. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mencatat data dan informasi yang dianggap relevan dengan variabel penelitian. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
2. Wawancara (*interview*), yaitu pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari pegawai sub bagian keuangan pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.
3. Pengamatan (*Observation*), yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk mengamati penerapan akuntansi berbasis akrual. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan instrumen berupa format observasi untuk mengukur bagaimana penerapan standar akuntansi berbasis akrual oleh pegawai sub bagian keuangan pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar (instrumen terlampir).

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Data kualitatif**

Data kualitatif yaitu data yang berupa keterangan atas penjelasan dari pihak yang berwenang mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual dan data lain yang relevan dengan objek penelitian.

#### **2. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari pegawai sub bagian keuangan. Data diperoleh melalui teknik dokumentasi, wawancara (*interview,*) dan pengamatan (*observation*).

### **D. Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah orang yang dapat memberikan informan tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini informan yang digunakan peneliti ialah sejumlah 2 orang pegawai sub bagian keuangan yang bisa menjelaskan penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.

### **E. Metode Analisis**

Untuk membahas masalah dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskriptifkan atau menggambarkan data dan informasi tentang variabel yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pedoman pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) dengan pegawai sub bagian keuangan (instrumen terlampir).

### **F. Defenisi Operasional Variabel**

Penerapan akuntansi berbasis akrual adalah penerapan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayar.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah singkat Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar**

Sejarah Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar di mulai dari perubahan nama kantor Administrasi Pelabuhan (Adpel) menjadi kantor Kesyabandaran dan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makasaar. Kantor Administrasi Pelabuhan (Adpel) secara resmi berganti nama menjadi Kantor Kesyabandaran Dan Otoritas Pelabuhan sesuai dengan amanat UU No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran dan KM No. 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan, PM No. 35 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja otoritas pelabuhan utama.

Pada tanggal 5 oktober 2010 di Jakarta Departemen Perhubungan secara resmi melakukan perubahan nomenklatur pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla). Selain peubahan nomenklatur, Kementerian Perhubungan juga menetapkan peningkatan kelas pada empat kantor Otoritas Pelabuhan (OP) diantaranya: pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan dan Makassar. Kantor kesyabandaran yang selama ini sudah ada di pelabuhan utama, menjadi kantor Otoritas Pelabuhan kelas utama dan kantor Kesyabandaran kelas utama.

Adapun tahap pengembangan periode 2013-2017 di Pelabuhan Utama Makassar sebagai berikut :

a. Pelabuhan Hatta

Meningkatkan kapasitas dan pelayanan fasilitas pelabuhan Hatta yang ada yakni berupa pembangunan perpanjangan dermaga *multi purpose* sepanjang 150m.

b. Makassar *New Port*

Merupakan proyek jangka panjang dan pada periode pengembangan ini (2013-2017) mulai dibangun Makassar *New Port* yakni berupa lahan reklamasi seluas 46 ha (disiapkan untuk dapat dibangun terminal petikemas di atasnya dengan kapasitas mencapai hingga 1.030.000 TEU's per tahun).

TEUS atau TEU (*twenty foot equivalent*) unit yang merupakan satuan terkecil dalam ukuran peti kemas.

c. Pelabuhan Soekarno

Pada periode ini di lokasi pelabuhan Soekarno akan dilakukan pengaturan kembali peruntukan lapangan dan dermaga untuk kapal Ro-Ro, general cargo, dan curah kering.

d. Pelabuhan Paotere

Pengembangan pada periode ini berupa pembangunan dermaga sepanjang 150m untuk kapal-kapal pelayaran rakyat dan juga sebagai tempat sandar untuk kapal-kapal nelayan.



## **B. Visi dan Misi Organisasi**

### 1. Visi

“Terselenggaranya pelabuhan yang kondusif, efektif, efisiensi dan berdaya saing tinggi dalam menunjang perekonomian nasional di Era Globalisasi”

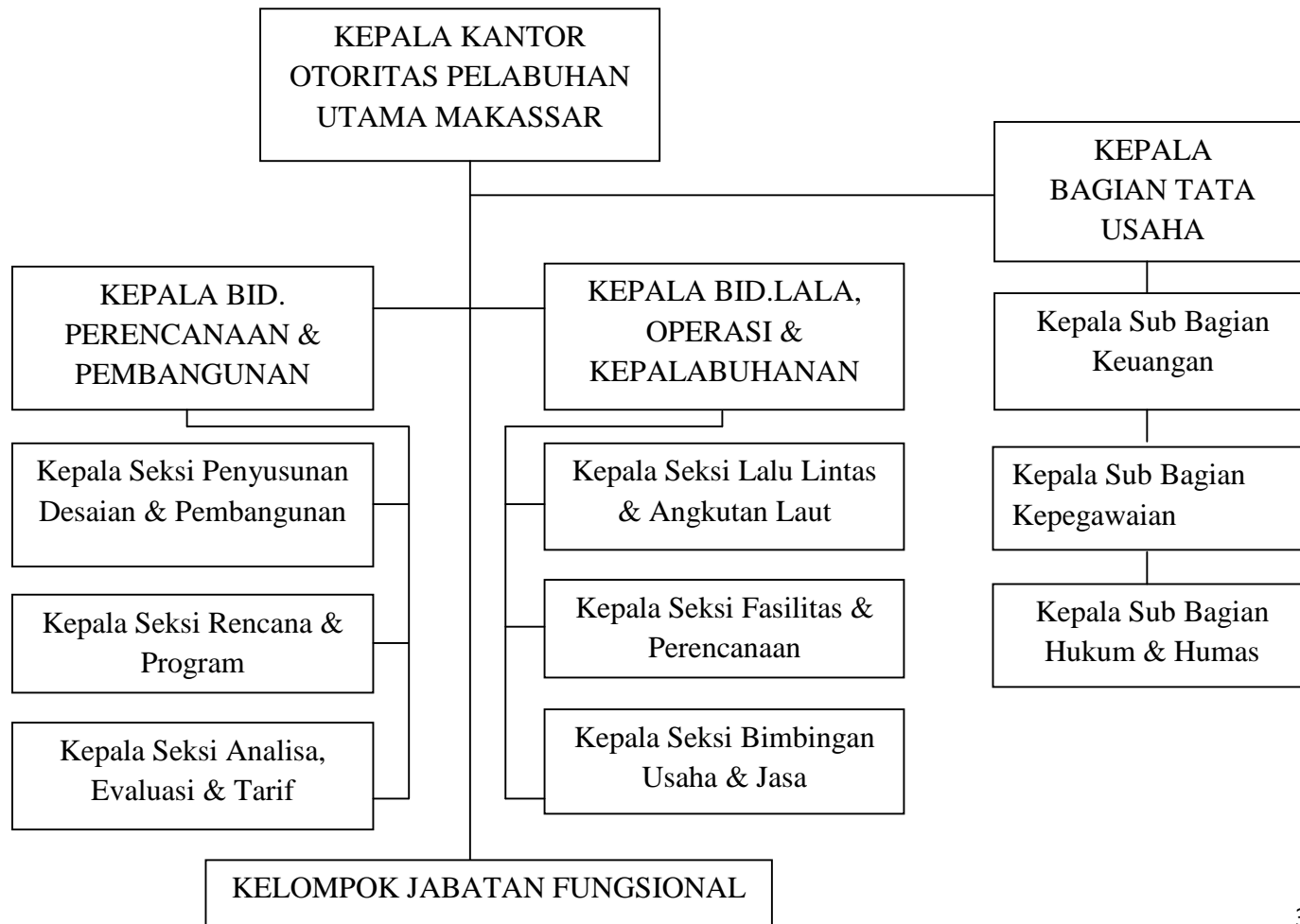
### 2. Misi

- a. Menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus barang serta kelestarian lingkungan pelabuhan;
- b. Mewujudkan Standar Kinerja Operasional Pelabuhan sesuai dengan kondisi fasilitas terminal;
- c. Menyediakan infrastruktur pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan sesuai dengan kebutuhan;
- d. Mewujudkan Tata Guna Lahan Daratan dan Perairan sesuai Rencana Induk Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp).

### C. Struktur Organisasi

Gambar 2.

Struktur Organisasi



#### **D. Kegiatan Usaha**

Kegiatan usaha yang dilakukan pelabuhan Makassar yaitu pelayanan terhadap kapal, barang, dan penumpang. Pelabuhan memberikan pelayanan terhadap kapal yang masuk dan keluar dari pelabuhan baik dalam negeri maupun luar negeri, kegiatan bongkar muat barang, dan melayani penumpang yang naik/turun dari kapal. Pelayanan ini dilakukan mengingat pentingnya keamanan dan ketertiban yang tentunya dirasakan oleh penumpang/masyarakat dan pihak dari pelabuhan itu sendiri.

Berikut ini uraian kegiatan usaha yang dilakukan di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, sebagai berikut :

- a. Data Kunjungan Kapal (*Ships Call*) dan *Gross Ton* (GT) di Pelabuhan Utama Makassar (Periode Januari s/d Desember Tahun 2016)

Tabel 2.

Data kunjungan Kapal (*Ships Call*) dan *Gross Ton* (GT)

| NO. | BULAN     | URAIAN JENIS ANGKUTAN LAUT |            |             |           |           |           |                  |        |           |         |           |            |
|-----|-----------|----------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------|--------|-----------|---------|-----------|------------|
|     |           | DALAM NEGERI               |            | LUAR NEGERI |           | KHUSUS    |           | PELAYARAN RAKYAT |        | PERINTIS  |         | JUMLAH    |            |
|     |           | SHIP CALL                  | GT         | SHIP CALL   | GT        | SHIP CALL | GT        | SHIP CALL        | GT     | SHIP CALL | GT      | SHIP CALL | GT         |
| 1   | JANUARI   | 304                        | 2.050.016  | 13          | 155.535   | 50        | 230.212   | 71               | 7.645  | 5         | 3.185   | 443       | 2.446.593  |
| 2   | FEBRUARI  | 301                        | 1.953.025  | 10          | 10.856    | 65        | 237.482   | 65               | 9.170  | 8         | 6.778   | 449       | 2.217.311  |
| 3   | MARET     | 177                        | 2.012.357  | 21          | 304.999   | 50        | 72.223    | 88               | 12.473 | 9         | 49.873  | 345       | 2.451.925  |
| 4   | APRIL     | 255                        | 1.832.834  | 12          | 161.422   | 48        | 193.021   | 61               | 6.316  | 7         | 4.673   | 383       | 2.198.266  |
| 5   | MEI       | 284                        | 1.993.091  | 19          | 338.752   | 46        | 263.224   | 82               | 8.212  | 9         | 6.583   | 440       | 2.609.862  |
| 6   | JUNI      | 303                        | 1.943.052  | 22          | 476.192   | 44        | 216.717   | 83               | 8.127  | 10        | 7.567   | 462       | 2.651.655  |
| 7   | JULI      | 254                        | 1.861.427  | 16          | 268.521   | 54        | 276.207   | 68               | 6.393  | 9         | 6.608   | 401       | 2.419.156  |
| 8   | AGUSTUS   | 306                        | 2.156.046  | 15          | 214.824   | 56        | 285.102   | 82               | 7.485  | 7         | 3.790   | 466       | 2.667.247  |
| 9   | SEPTEMBER | 310                        | 1.987.774  | 18          | 348.999   | 52        | 279.397   | 68               | 6.393  | 8         | 4.535   | 456       | 2.627.098  |
| 10  | OKTOBER   | 342                        | 2.091.961  | 19          | 263.759   | 51        | 247.226   | 60               | 5.509  | 10        | 8.303   | 482       | 2.616.758  |
| 11  | NOVEMBER  | 318                        | 2.079.007  | 15          | 238.501   | 50        | 260.302   | 66               | 7.079  | 4         | 3.408   | 453       | 2.588.297  |
| 12  | DESEMBER  | 325                        | 2.406.820  | 20          | 367.828   | 55        | 271.786   | 61               | 6.614  | 5         | 4.667   | 466       | 3.057.715  |
|     | JUMLAH    | 3.479                      | 24.367.410 | 200         | 3.150.188 | 621       | 2.832.899 | 855              | 91.416 | 91        | 109.970 | 5.246     | 30.551.883 |

Sumber : Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

Kunjungan Kapal (*ships call*) adalah kapal yang datang di pelabuhan baik untuk berlabuh di perairan maupun bersandar di dermaga

*Gross Ton* (GT) adalah volume ruangan kapal dalam m kubik meliputi volume ruangan kapal kecuali tunnel (terowongan), lubang poros baling-baling, *chain locker* (tempat jangkar) dan alas ganda.

Pelayanan kapal dimulai dari kapal masuk ke perairan pelabuhan, berada di kolam pelabuhan, ketika akan bersandar di tambatan, sampai saat kapal meninggalkan pelabuhan.

b. Data Bongkar Muat di Pelabuhan Makassar (Periode Januari s/d Desember Tahun 2016)

Tabel 3.

Data Bongkar Muat Dipelabuhan Makassar

| NO.    | BULAN     | URAIAN JENIS ANGKUTAN LAUT |           |             |         |           |         |                  |         |          |       |           |           |
|--------|-----------|----------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|---------|------------------|---------|----------|-------|-----------|-----------|
|        |           | DALAM NEGERI               |           | LUAR NEGERI |         | KHUSUS    |         | PELAYARAN RAKYAT |         | PERINTIS |       | JUMLAH    |           |
|        |           | BONGKAR                    | MUAT      | BONGKAR     | MUAT    | BONGKAR   | MUAT    | BONGKAR          | MUAT    | BONGKAR  | MUAT  | BONGKAR   | MUAT      |
| 1      | JANUARI   | 481.700                    | 447.227   | 112.714     | 11.025  | 123.694   | 45.000  | 2.708            | 14.893  | -        | 700   | 720.816   | 518.845   |
| 2      | FEBRUARI  | 311.787                    | 279.495   | 43.339      | 17.872  | 145.969   | 66.389  | 1.597            | 16.081  | -        | 48    | 502.692   | 379.885   |
| 3      | MARET     | 249.285                    | 404.341   | 165.833     | 11.744  | 146.466   | 57.412  | 663              | 18.340  | -        | 40    | 562.247   | 491.877   |
| 4      | APRIL     | 394.326                    | 340.499   | 25.320      | 19.815  | 85.900    | 55.417  | 1.070            | 8.490   | -        | 200   | 506.616   | 424.421   |
| 5      | MEI       | 628.840                    | 316.936   | 54.151      | 20.245  | 148.078   | 70.085  | 694              | 11.285  | -        | 200   | 831.763   | 418.751   |
| 6      | JUNI      | 217.992                    | 365.370   | 143.405     | 49.802  | 131.639   | 40.185  | 1.314            | 8.948   | -        | 869   | 494.350   | 465.174   |
| 7      | JULI      | 318.416                    | 272.169   | 42.437      | 50.486  | 191.363   | 32.655  | 2.844            | 10.368  | -        | 120   | 555.060   | 365.798   |
| 8      | AGUSTUS   | 350.017                    | 434.437   | 135.028     | 17.704  | 151.744   | 33.020  | 2.353            | 11.002  | -        | 210   | 639.142   | 496.373   |
| 9      | SEPTEMBER | 287.920                    | 419.969   | 129.692     | 31.250  | 156.107   | 50.981  | 2.844            | 10.368  | -        | 134   | 576.563   | 512.702   |
| 10     | OKTOBER   | 366.197                    | 434.351   | 95.302      | 32.353  | 134.881   | 37.288  | 1.775            | 8.948   | -        | 1.624 | 598.155   | 514.564   |
| 11     | NOVEMBER  | 337.311                    | 340.799   | 72.608      | 89.812  | 114.479   | 60.178  | 1.261            | 12.310  | -        | 120   | 525.659   | 503.219   |
| 12     | DESEMBER  | 265.813                    | 399.434   | 148.680     | 45.234  | 159.409   | 36.007  | 1.080            | 7.687   | -        | 29    | 574.982   | 488.391   |
| JUMLAH |           | 4.209.604                  | 4.455.027 | 1.168.509   | 397.342 | 1.689.729 | 584.617 | 20.203           | 138.720 | -        | 4.294 | 7.088.045 | 5.580.000 |

Sumber : Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

Bongkar/Impor Barang adalah pembongkaran barang dari kapal, baik barang yang diangkut dari pelabuhan asal di Indonesia ataupun dari luar negeri.

Muat/Ekspor Barang adalah pemuatan barang ke kapal untuk diangkut ke pelabuhan tujuan di Indonesia atau ke luar negeri

Bongkar muat barang jenis peralatan bongkar muat yang digunakan di pelabuhan sangat tergantung kepada jenis barang yang akan dibongkar/muat.

Secara umum jenis barang dimaksud dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu: barang yang dikemas dengan petikemas, *general cargo* dan barang curah (kering/cair).

c. Data Arus Penumpang di Pelabuhan Makassar (Periode Januari s/d Desember Tahun 2016)

Tabel 4.

Data Arus Penumpang di Pelabuhan Makassar

| NO.           | BULAN     | CALL        | KEGIATAN           |                   | JUMLAH<br>TURUN /NAIK<br>DALAM JIWA | KETERANGAN |
|---------------|-----------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|------------|
|               |           |             | PENUMPANG<br>TURUN | PENUMPANG<br>NAIK |                                     |            |
| 1             | JANUARI   | 89          | 24.600             | 28.234            | 52.834                              |            |
| 2             | FEBRUARI  | 82          | 17.390             | 17.251            | 34.641                              |            |
| 3             | MARET     | 72          | 13.534             | 15.225            | 28.759                              |            |
| 4             | APRIL     | 77          | 15.596             | 11.192            | 26.788                              |            |
| 5             | MEI       | 80          | 22.407             | 17.869            | 40.276                              |            |
| 6             | JUNI      | 106         | 29.920             | 39.256            | 69.176                              |            |
| 7             | JULI      | 107         | 37.497             | 48.267            | 85.764                              |            |
| 8             | AGUSTUS   | 86          | 30.337             | 26.850            | 57.187                              |            |
| 9             | SEPTEMBER | 92          | 28.559             | 20.360            | 48.919                              |            |
| 10            | OKTOBER   | 94          | 24.147             | 20.941            | 45.088                              |            |
| 11            | NOVEMBER  | 94          | 20.638             | 16.290            | 36.928                              |            |
| 12            | DESEMBER  | 101         | 27.390             | 21.925            | 49.315                              |            |
| <b>JUMLAH</b> |           | <b>1080</b> | <b>292.015</b>     | <b>283.660</b>    | <b>575.675</b>                      |            |

Sumber : Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

Penumpang naik adalah penumpang yang naik ke kapal untuk berangkat ke pelabuhan tujuan.

Penumpang turun adalah penumpang yang turun dari kapal yang diangkut dari pelabuhan asal.

Petugas melayani dan membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan, melakukan pengamanan dan pelayanan terhadap penumpang naik/turun dari kapal dengan selamat.



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan fokus dari penelitian ini mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi saiba pada kantor otoritas pelabuhan utama makassar, dimana penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif.

Pada penelitian deskriptif kualitatif peneliti dituntut dapat memaparkan, menjelaskan, menggunakan dan menggali data berdasarkan apa yang di ucapkan, dirasakan, dan dilakukan oleh sumber data sebagaimana adanya yang terjadi dilapangan melalui tehnik pengamatan dan wawancara.

##### 1. Data informan penelitian

Berikut ini data informan dalam penelitian yang berjumlah 2 orang.

Tabel 5.  
Data Informan Penelitian

| No. | Nama                     | Jabatan            |
|-----|--------------------------|--------------------|
| 1.  | Andarias Allopa, SE (An) | Pengelola Keuangan |
| 2.  | Eko Permata, SE (Eko)    | Pengelola Keuangan |

Berdasarkan data tabel 5 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini memiliki 2 informan yang sama-sama bergerak pada bagian pengelola keuangan. Dimana kantor pemerintahan termasuk didalamnya Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar diwajibkan menerapkan akuntansi

berbasis akrual pada bidang keuangan dan penerapannya di mulai sejak tahun 2015.

## 2. Deskripsi Hasil Penelitian

Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, berbuah keputusan penghapusan standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual dan penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual secara penuh mulai tahun 2015.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) bahwa yang dimaksud dengan SAP berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD.

Dari hasil penelitian ini didapatkan melalui wawancara yang dilakukan pada kurung waktu bulan April sampai Mei 2017. Dimana informan yang melakukan wawancara adalah pegawai sub bagian keuangan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.

Adapun latar belakang pendidikan informan keduanya lulusan Sarjana Ekonomi (SE) dan kini dalam tahap menyelesaikan pendidikan S2 (tesis) disalah satu universitas di Makassar.

Berbicara mengenai pengetahuan akuntansi dan komputerisasinya tidak usah diragukan lagi selain itu keduanya sudah berkerja di bidang akuntansi ini kurang lebih 13 tahun lamanya.

Berikut ini deskripsi hasil penelitian dengan pegawai sub bagian keuangan :

a. Sistem Akuntansi Terkomputerisasi

Dalam mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan (akuntansi) proses akuntansi telah berstandar komputerisasi.

Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar khususnya pegawai sub bagian keuangan dalam mengerjakan proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi. Adapun tahap-tahap dalam proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan, dimulai dari transaksi berupa dokumen-dokumen (bukti pembayaran/sejenisnya) kemudian di perlihatkan kepada bendahara, pencairan dana dari bendahara dimuat kedalam aplikasi SPM (Surat Perintah Membayar), setelah SPMnya jadi dilaporkan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara), KPPN mengeluarkan SP2D dasar SP2D itulah dibuat laporan keuangan yang di input kedalam Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual (aplikasi SAIBA) (Wawancara terlampir, lampiran 4).

Selain itu pegawai sub pegawai memiliki kewajiban untuk mengetahui semua aplikasi terkomputerisasi akan tetapi dalam

penggunaan komputerisasinya disesuaikan dengan tupoksi mereka masing-masing. Apabila aplikasi komputerisasi yang berkaitan dengan pelaporan berarti yang menangani pelaporan yang harus tahu mengoperasikan aplikasi akuntansi tersebut. Pegawai lain dapat mengetahuinya namun tidak diharuskan, untuk pekerjaan sudah tertupoksi artinya masing-masing pegawai memiliki tanggung jawab masing-masing (Wawancara terlampir, lampiran 4).

Kantor otoritas pelabuhan utama makassar khususnya pada bidang sub bagian keuangan memiliki berapa aplikasi yang digunakan untuk mengelolah keuangan diantaranya (Wawancara terlampir, lampiran 4):

- 1) Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual (SAIBA),
- 2) Sistem E-monitoring (berbasis web),
- 3) Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RAK-KL),
- 4) Sistem Aplikasi Satker (SAS), untuk aplikasi SAS terbagi menjadi tiga yaitu SAS SPM (Surat Perintah Membayar), SAS Bendahara Penerimaan, dan SAS Bendahara Pengeluaran.
- 5) Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN),
- 6) Aplikasi PERSEDIAAN,
- 7) Aplikasi Gaji Pegawai Pusat (GPP),
- 8) Span
- 9) Simpony

b. Basis akrual

Basis akuntansi yang diterapkan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar adalah basis akrual, pegawai sub bagian keuangan sudah mengetahui bahwa saat ini basis akuntansi yang diterapkan adalah basis akrual. Perbedaan dalam hal penerapan aplikasi basis kas dan basis akrual terletak pada pengakuannya. Basis kas artinya saat transaksi uang keluar baru diakui sebagai laporan atau dengan kata lain mengakui apa yang ada pada saat itu itulah yang dilaporkan, sedangkan basis akrual peristiwa/kejadian baru saja terjadi sudah diakui sebagai pendapatan atau pengeluaran walaupun uang belum diterima/dibayar (Wawancara terlampir, lampiran 4).

Berbicara mengenai apakah pegawai sub bagian keuangan sudah bisa membedakan antara akuntansi berbasis kas, dan akuntansi berbasis akrual. Secara keseluruhan pegawai sub bagian keuangan, ada yang tahu ada yang tidak khusus untuk pelaporan sudah tentu tahu membedakannya, yang mana basis kas dan yang mana basis akrual. Disinilah peran pemerintah menerapkan basis akrual dimana datanya lebih valid dibandingkan dengan basis kas sehingga tidak terlalu membebani diakhir tahun (Wawancara terlampir, lampiran 4).

c. Aplikasi SAIBA

Aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual) merupakan aplikasi keuangan satuan kerja yang digunakan untuk keperluan pelaporan. Dimana pegawai sub bagian keuangan telah

beberapa kali mengikuti pelatihan khusus dalam mengoperasikan aplikasi SAIBA, pelatihan/bimtek sendiri pernah diadakan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar di Makassar selain itu juga pernah di adakan secara besar-besaran oleh Kementerian Keuangan/Perbendaharaan di Jakarta (Wawancara terlampir, lampiran 4).

Dilihat dari sisi keterampilan dan keahlian pegawai sub bagian keuangan telah memilikinya, sebab pegawai sub bagian keuangan telah ikut serta dalam pelatihan/bimtek. Selain itu juga berbekal dari aplikasi sebelumnya diterapkan (aplikasi SAKPA) yang pengoperasiannya tidak jauh berbeda dengan aplikasi yang saat ini diterapkan (aplikasi SAIBA) (Wawancara terlampir, lampiran 4).

Dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA pegawai sub bagian keuangan merasa sangat terbantu dengan perubahan basis akuntansi tersebut, karena penerapan basis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA artinya memudahkan pegawai untuk membuat/menyusun laporan keuangan. Bentuk kemudahan yang dimaksud adalah apabila kita ingin melihat laporan operasional kita bisa langsung melihatnya secara rinci bahkan jenis-jenis realisasinya LO nya berapa, akan nampak secara mendetail (Wawancara terlampir, lampiran 4).

Pada intinya sistem pelaporan keuangan dengan basis akrual pada kantor Otoritas Pelabuhan berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini dibenarkan oleh informan An sebagai berikut :

*“Untuk penerapan akuntansi berbasis akrual di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, sudah berjalan dengan baik dan lancar. Bukti bahwa Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar menerapkan basis akrual yaitu dengan di terapkan/digunakannya aplikasi SAIBA untuk pelaporan keuangan. Aplikasi SAIBA sudah berbasis akrual karena itu merupakan nama aplikasi dari suatu sistem yaitu Sistem akuntansi Instansi Basis Akrual (SAIBA) (Wawancara hari kamis tanggal 04 Mei 2017).*

Hasil penelitian dan fakta dilapangan menunjukkan bahwa Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar telah ikut serta wacana pemerintah mengenai penerapan basis akrual. Untuk kantor instansi pemerintah dalam hal ini Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar telah melaksanakan dan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. Penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA pada kantor otoritas pelabuhan utama makassar telah berjalan dengan baik sesuai dengan imbauan pemerintah dan kapasitas yang tersedia.

## **B. Pembahasan**

### **1. Penerapan Pelaporan Keuangan Dengan Menggunakan Basis Akrual Terkomputerisasi Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar**

Perubahan peraturan perundang-undangan berakibat pada perubahan terhadap basis akuntansi yang selama ini digunakan/diterapkan. Selain mengubah basis Sistem Akuntansi Pemerintah dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut sekaligus sebagai penyesuaian terhadap dinamika pengelolaan keuangan negara yang terus berkembang.

Dengan demikian, proses implementasi akuntansi berbasis akrual yang dimulai sejak tahun 2015, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar telah menerapkan dan melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual.

Berikut ini beberapa hal yang mendukung penerapan pelaporan keuangan terkomputerisasi dengan menggunakan basis akrual pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.

a. Sistem Akuntansi Terkomputerisasi

Sistem akuntansi terkomputerisasi dalam hal ini sistem akuntansi didukung oleh infrastruktur yang tersedia, dimana hal tersebut dimaksudkan untuk kelancaran usaha/bisnis baik untuk perusahaan, kantor dan dunia bisnis pada umumnya.

Berbicara tentang infrastruktur dalam hal ini jaringan (internet) untuk sementara bisa dikategorikan baik. Akan tetapi kalau untuk aplikasi SAIBAny sendiri, tanpa jaringan secara online juga bisa dioperasikan karena untuk pembuatan laporan keuangannya dilakukan secara komputerisasi dan bukan online. Kecuali pelaporan dengan menggunakan sistem e-monitoring memang infrastruktur itulah yang dibutuhkan karena berbasis web/internet (Wawancara terlampir, lampiran 4).

Selain infrastruktur jaringan, ada juga infrastruktur teknologi informasi (TI). Untuk yang satu ini tergantung pada komputernya, kalau komputernya baik maka bisa dikatakan baik. Untuk aplikasi



SAIBA di instal manual di komputer dan tidak ter-link ke web/internet. Aplikasi SAIBA merupakan aplikasi pengembangan dari aplikasi SAKPA yang dikembangkan oleh Kementerian keuangan. Akselerasi sosialisasi dilakukan oleh KPPN kepada seluruh kantor instansi pemerintah dan pertanggungjawaban atas pelaporan keuangan langsung ke Kementerian melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) (Wawancara terlampir, lampiran 4).

Penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA, dilakukan secara komputerisasi berjalan dengan baik dan lancar. Adapun sistem akuntansi yang digunakan yaitu aplikasi SAIBA yang mana telah digunakan dan dipakai secara maksimal sesuai dengan tujuan akhirnya yaitu pelaporan keuangan berbasis akrual (Wawancara terlampir, lampiran 4).

b. Akuntansi Sumber Daya Manusia (SDM Akuntansi)

Akuntansi sumber daya manusia (SDM Akuntansi) berarti akuntansi untuk manusia sebagai suatu sumber daya organisasional. Hal ini melibatkan pengukuran biaya yang dikeluarkan oleh kantor instansi pemerintahan/perusahaan dan organisasi lainnya untuk merekrut, menyeleksi, mempekerjakan, melatih dan mengembangkan aktiva manusia. Akuntansi sumber daya manusia juga melibatkan pengukuran terhadap biaya yang akan dikeluarkan untuk menggantikan sumber daya manusia dari suatu organisasi.

Berbicara tentang akuntansi sumber daya manusia berarti berbicara tentang partisipasi yang dilakukan oleh pegawai sub bagian keuangan mengenai penggunaan aplikasi berbasis akrual, bentuk partisipasi yang dilakukan mengenai penggunaan aplikasi berbasis akrual yaitu aplikasi SAIBA, telah pakai secara full dan semaksimal mungkin sebab untuk kembali menggunakan basis kas, aplikasi tersebut (SAKPA) sudah tidak ada tersedia (Wawancara terlampir, lampiran 4).

Laporan Keuangan yang dihasilkan dengan basis akrual memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan, yaitu dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif, tidak hanya dalam capaian realisasi anggaran namun juga data yang dihasilkan merupakan data yang lebih valid. Mengapa dikatakan valid karena datanya benar-benar menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

## 2. Aplikasi Dalam Menyusun Laporan Keuangan Basis Akrual

Sebagaimana penyusunan laporan keuangan sampai dengan tahun 2014 yang berbasis kas menuju akrual, penyusunan laporan keuangan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi komputer yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Pada tahun 2015, sistem yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual tetap menggunakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri dari Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan

Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual (SAIBA).

Pada dasarnya aplikasi SAIBA adalah pengembangan dari aplikasi SAKPA. Pengembangan yang dilakukan adalah:

- a. Sesuai dengan komponen laporan keuangan yang harus disusun berdasarkan basis akrual, maka Aplikasi SAIBA dapat menghasilkan LO dan LPE, selain menghasilkan LRA dan Neraca.
- b. Dalam rangka menghasilkan laporan-laporan tersebut, maka dalam aplikasi SAIBA terdapat tambahan menu transaksi, yaitu menu Jurnal Penyesuaian. Menu ini digunakan untuk meng-*input* transaksi-transaksi yang melibatkan akun-akun akrual, seperti: pendapatan diterima dimuka; pendapatan yang masih harus diterima; beban dibayar dimuka; beban yang masih harus dibayar; beban persediaan; beban penyesuaian piutang; dan beban penyusutan.

Sedangkan tata cara penggunaan aplikasi SAIBA pada dasarnya sama dengan aplikasi SAKPA, yaitu: *Input* dokumen sumber (DIPA, Revisi DIPA, SPM, SP2D, SSBP dan SSPB), *Input* jurnal Neraca, *Input* Jurnal Penyesuaian, *Posting*, Cetak Laporan-Laporan.

Perihal penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dapat dikatakan berjalan dengan lancar dan dapat dikategorikan baik. Selain itu selama mengoperasikan aplikasi basis akrual tersebut pegawai sub bagian keuangan tidak menemui kendala yang berarti.

Berikut ini adalah tampilan pada aplikasi SAIBA, sebagai berikut :

Gambar 3.

Tampilan Awal Pada Aplikasi SAIBA



Gambar 4.

Tampilan Menu Tabel Referensi



Tabel Referensi digunakan untuk menampilkan kode-- kode dalam tabel secara keseluruhan yang ada dalam sub menu beserta uraian dari kode- kode tabel yang dimaksud. Dalam Tabel Referensi ini juga dapat dicari kode dan uraian tertentu dengan mengetik seluruh atau sebagian dari uraian yang dimaksudkan.

Gambar 5.

## Tampilan Buku Besar Akrual

| Kd. MAKMAP | D-K | Akun   | Uraian Akun                             | Kd-Tm | Kd-Kem |
|------------|-----|--------|---|-------|--------|
| 411111     | D   | 313121 | Diberima dari Entitas Lain              | 3     | 0      |
| 411111     | K   | 411111 | Pendapatan PPh Minyak Bumi              | 3     | 0      |
| 411111     | K   | 411111 | Pengembalian Pendapatan PPh Minyak Bumi | 3     | 0      |
| 411111     | D   | 411111 | Pendapatan PPh Minyak Bumi              | 3     | 1      |
| 411111     | D   | 411111 | Pengembalian Pendapatan PPh Minyak Bumi | 3     | 1      |
| 411111     | K   | 313121 | Diberima dari Entitas Lain              | 3     | 1      |
| 411112     | D   | 313121 | Diberima dari Entitas Lain              | 3     | 0      |
| 411112     | K   | 411112 | Pendapatan PPh Gas Bumi                 | 3     | 0      |
| 411112     | K   | 411112 | Pengembalian Pendapatan PPh Gas Bumi    | 3     | 0      |
| 411112     | D   | 411112 | Pendapatan PPh Gas Bumi                 | 3     | 1      |
| 411112     | D   | 411112 | Pengembalian Pendapatan PPh Gas Bumi    | 3     | 1      |
| 411112     | K   | 313121 | Diberima dari Entitas Lain              | 3     | 1      |
| 411119     | D   | 313121 | Diberima dari Entitas Lain              | 3     | 0      |

Untuk buku besar akrual yang dibaca hanya nomor SP2D jadi tidak perlu menjurnal lagi karena otomatis terbentuk. Untuk penerapannya sendiri pada buku besar akrual debit yang langsung menilai sesuai SP2D yang dibebankan.

Gambar 6.  
Tampilan Pada Menu Transaksi

| Tabel Referensi | Transaksi                                      | Terima SKPA | Proses | Rekonsiliasi BMN | Laporan | Utility | Selesai |
|-----------------|--|-------------|--------|------------------|---------|---------|---------|
|                 | Copy DIPA dari Aplikasi SPM                    |             |        |                  |         |         |         |
|                 | Daftar DIPA                                    |             |        |                  |         |         |         |
|                 | Copy Revisi DIPA dari Aplikasi SPM             |             |        |                  |         |         |         |
|                 | Daftar Revisi DIPA                             |             |        |                  |         |         |         |
|                 | Estimasi Pendapatan                            |             |        |                  |         |         |         |
|                 | DIPA LUNCURAN                                  |             |        |                  |         |         |         |
|                 | DIPA STIMULUS                                  |             |        |                  |         |         |         |
|                 | REVISI DIPA STIMULUS                           |             |        |                  |         |         |         |
|                 | Copy SPM/SP2D dari Aplikasi SPM                |             |        |                  |         |         |         |
|                 | Daftar SPM dan SP2D                            |             |        |                  |         |         |         |
|                 | Daftar SP3B dan SP2B-BLU                       |             |        |                  |         |         |         |
|                 | Daftar SP2HL dan SPHL                          |             |        |                  |         |         |         |
|                 | Daftar SP4HL dan SP3HL                         |             |        |                  |         |         |         |
|                 | Daftar Memo PHLBJS dan Persetujuan Memo PHLBJS |             |        |                  |         |         |         |
|                 | Pendapatan                                     |             |        |                  |         |         |         |
|                 | Pengembalian Belanja                           |             |        |                  |         |         |         |
|                 | Perekaman SSP (Bendahara)                      |             |        |                  |         |         |         |
|                 | Jurnal Reklasifikasi Neraca                    |             |        |                  |         |         |         |
|                 | Jurnal Penyesuaian                             |             |        |                  |         |         |         |
|                 | Jurnal Koreksi                                 |             |        |                  |         |         |         |

Gambar 7.  
Tampilan Untuk Proses Posting

**PROSES** | **PROSES Posting** | **SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BASIS AKRUAL**

Periode

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keluar

Informasi

| Periode Posting     | Periode Posting |
|---------------------|-----------------|
| DIPA                | 000000 record   |
| DIPA Luncuran       | 000000 record   |
| SKPA                | 0 record        |
| Revisi DIPA         | 000000 record   |
| Estimasi Pendapatan | 000000 record   |
| SPM/SP2D            | 000000 lembar   |
| Penerimaan          | 000000 record   |
| Jurnal Neraca       | 000000 record   |
| Data SABMN          | 000000 record   |
| Koreksi             | 0 record        |

Hasil Posting

PERIODE  Jurnal

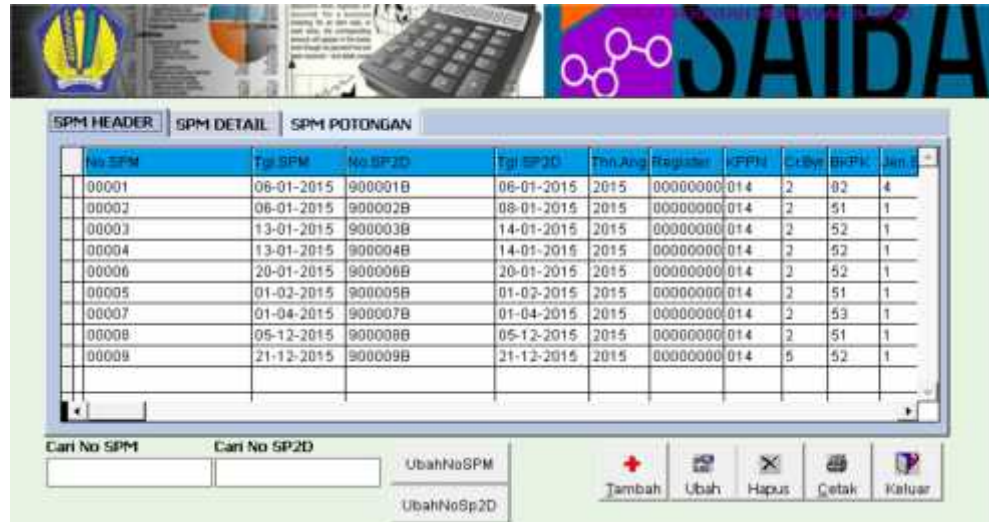
Proses Posting dilakukan untuk memindahkan transaksi yang telah tercatat dan benar ke Buku Besar. Proses posting ini dilakukan setiap bulan. Jika terdapat perubahan transaksi pada bulan yang telah dilakukan proses posting, maka transaksi pada bulan tersebut harus dilakukan posting ulang.

Gambar 8.  
Tampilan Untuk Menu Laporan



Pada masing-masing menu laporan akan diminta mengisikan format dari jenis laporan yang akan dicetak.

Gambar 9.  
Tampilan Daftar Surat Perintah Membayar (SPM)



| No. SPM | Tgl. SPM   | No. SP2D | Tgl. SP2D  | Thn. Ang | Register | KPPN | Cr. Svc | Br. PK | Jan. 3 |
|---------|------------|----------|------------|----------|----------|------|---------|--------|--------|
| 00001   | 06-01-2015 | 900001B  | 06-01-2015 | 2015     | 00000000 | 014  | 2       | 02     | 4      |
| 00002   | 06-01-2015 | 900002B  | 08-01-2015 | 2015     | 00000000 | 014  | 2       | 51     | 1      |
| 00003   | 13-01-2015 | 900003B  | 14-01-2015 | 2015     | 00000000 | 014  | 2       | 52     | 1      |
| 00004   | 13-01-2015 | 900004B  | 14-01-2015 | 2015     | 00000000 | 014  | 2       | 52     | 1      |
| 00006   | 20-01-2015 | 900006B  | 20-01-2015 | 2015     | 00000000 | 014  | 2       | 52     | 1      |
| 00005   | 01-02-2015 | 900005B  | 01-02-2015 | 2015     | 00000000 | 014  | 2       | 51     | 1      |
| 00007   | 01-04-2015 | 900007B  | 01-04-2015 | 2015     | 00000000 | 014  | 2       | 53     | 1      |
| 00008   | 05-12-2015 | 900008B  | 05-12-2015 | 2015     | 00000000 | 014  | 2       | 51     | 1      |
| 00009   | 21-12-2015 | 900009B  | 21-12-2015 | 2015     | 00000000 | 014  | 5       | 52     | 1      |

Daftar SPM digunakan untuk menampilkan daftar SPM yang ada untuk Satker yang bersangkutan.

Demikianlah beberapa jenis tampilan aplikasi SAIBA dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.

### 3. Komponen Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut:



a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, LRA mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD.

Tabel 6.

Format Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016  
(DALAM RUPIAH)**

| No       | URAIAN                             | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN | % REALISASI ANGGARAN |
|----------|------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------|----------------------|
| 1        | 2                                  | 3        | 4         | 5                                  | 6                    |
| <b>A</b> | <b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b> |          |           |                                    |                      |
|          | 1. PENERIMAAN DALAM NEGERI         | xxx      | xxx       | xxx                                | xxx                  |
|          | a. Penerimaan Perpajakan           | xxx      | xxx       | xxx                                | xxx                  |
|          | b. Penerimaan Negara Bukan Pajak   | xxx      | xxx       | xxx                                | xxx                  |
|          | 2. HIBAH                           | xxx      | xxx       | xxx                                | xxx                  |
|          | <b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b> | xxx      | xxx       | xxx                                | xxx                  |
| <b>B</b> | <b>BELANJA</b>                     |          |           |                                    |                      |
|          | Belanja pegawai                    | xxx      | xxx       | xxx                                | xxx                  |
|          | Belanja Barang                     | xxx      | xxx       | xxx                                | xxx                  |
|          | Belanja Modal                      | xxx      | xxx       | xxx                                | xxx                  |
|          | Pembiayaan Bunga Utang             | xxx      | xxx       | xxx                                | xxx                  |
|          | Subsidi                            | xxx      | xxx       | xxx                                | xxx                  |
|          | Hibah                              | xxx      | xxx       | xxx                                | xxx                  |
|          | Bantuan Sosial                     | xxxx     | xxx       | xxx                                | xxx                  |

|          |   |     |     |     |     |
|----------|---|-----|-----|-----|-----|
|          | Belanja Lain-Lain                             | xxx | xxx | xxx | xxx |
|          | <b>JUMLAH BELANJA (B I + B II)</b>            | xxx | xxx | xxx | xxx |
| <b>C</b> | <b>PEMBIAYAAN</b>                             |     |     |     |     |
|          | 1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)             | xxx | xxx | xxx | xxx |
|          | a. Perbankan Dalam Negeri (Neto)              | xxx | xxx | xxx | xxx |
|          | b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)          | xxx | xxx | xxx | xxx |
|          | 2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)              | xxx | xxx | xxx | xxx |
|          | a. Penanaman Pinjaman Luar Negeri             |     |     |     |     |
|          | b. Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri | xxx | xxx | xxx | xxx |
|          | <b>JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1+ C.2)</b>           | xxx | xxx | xxx | xxx |

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

LP-SAL menyajikan pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

Tabel 7.

Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

**UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016**

**(DALAM RUPIAH)**

| No | Uraian  | 20xx  | 20xx  |
|----|---|-------|-------|
| 1  | Saldo anggarean lebih awa                                   | xxx   | xxx   |
| 2  | Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan | (xxx) | (xxx) |
| 3  | Subtotal (1-2)  | xxx   | xxx   |
| 4  | Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)         | xxx   | xxx   |
| 5  | Subtotal (3+4)  | xxx   | xxx   |
| 6  | Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya                | xxx   | xxx   |
| 7  | Lain-lain   | xxx   | xxx   |
| 8  | Saldo anggaran lebih akhir (5+6+7)                          | xxx   | xxx   |

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Aset

Aset dapat diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

2) Kewajiban

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas setelah tanggal pelaporan. Sedangkan kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

3) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Tabel 8.  
Format Neraca  
**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2016**  
**(DALAM RUPIAH)**

| NAMA PERKIRAAN   | JUMLAH   |
|--|----------|
| <b>1</b><br>ASET                                       | <b>2</b> |
| <b>ASET LANCAR</b>                                     |          |
| Kas Di Bendahara Penerimaan                            | xxx      |
| Piutang Bukan Pajak                                    | xxx      |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Pitang Bukan Pajak | xxx      |
| <i>Piutang Bukan Pajak (Netto)</i>                     | xxx      |
| Persediaan   | xxx      |
| <b>JUMLAH ASET LANCAR</b>                              | xxx      |
| <b>ASET TETAP</b>                                      |          |
| Peralatan Dan Mesin                                    | xxx      |
| Gedung Dan Bangunan                                    | xxx      |
| Jalan, Irigasi Dan Jaringan                            | xxx      |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan                            | xxx      |
| Akuntansi Penyusutan                                   | (xxx)    |
| <b>JUMLAH ASET TETAP</b>                               | xxx      |
| <b>ASET LAINNYA</b>                                    |          |
| Aset Tak Berwujud                                      | xxx      |
| Aset Lain-Lain   | xxx      |
| Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya           | xxx      |
| <b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>                             | xxx      |
| <b>JUMLAH ASET</b>                                     | xxx      |
| <b>EKUITAS</b>   |          |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| <b>EKUITAS</b>                      |     |
| Ekuitas                             | xxx |
| <b>JUMLAH EKUITAS</b>               | xxx |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b> | xxx |

d. Laporan Operasional (LO)

Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Di samping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non-operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

Tabel 9.

Format Laporan Operasional (LO)

**LAPORAN OPERASIONAL**

**TINGKAT SATUAN KERJA**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016

**(DALAM RUPIAH)**

| <b>URAIAN</b>   | <b>JUMLAH</b> |
|---|---------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>      |
| <b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>                                   |               |
| <b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>                                 |               |
| <b>PENDAPATAN PERPAJAKAN</b>                                  |               |
| Pendapatan Pajak Penghasilan                                  | xxx           |
| Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Dan Penjualan Barang Mewah | xxx           |
| Pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan                            | xxx           |
| Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan          | xxx           |

|  |            |
|--|------------|
| Pendapatan Cukai   | XXX        |
| Pendapatan Pajak Lainnya                                       | XXX        |
| Pendapatan Bea Masuk   | XXX        |
| Pendapatan Bea Keluar  | XXX        |
| <b>Jumlah Pendapatan Perpajakan</b>                            | <b>XXX</b> |
| <b>PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>                           |            |
| Pendapatan Sumber Daya Alam                                    | XXX        |
| Pendapatan Bagian Pemerintah Atas Laba                         | XXX        |
| Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya                          | XXX        |
| <b>Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak</b>                    | <b>XXX</b> |
| <b>PENDAPATAN HIBAH</b>  |            |
| Pendapatan Hibah   | XXX        |
| <b>Jumlah Pendapatan Hibah</b>                                 | <b>XXX</b> |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL</b>                           | <b>XXX</b> |
| <b>BEBAN OPERASIONAL</b>                                       |            |
| Beban Pegawai  | XXX        |
| Beban Persediaan   | XXX        |
| Beban Barang Dan Jasa  | XXX        |
| Beban Pemeliharaan   | XXX        |
| Beban Perjalanan Dinas   | XXX        |
| Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat                | XXX        |
| Beban Bunga  | XXX        |
| Beban Subsidi  | XXX        |
| Beban Hibah  | XXX        |
| Beban Bantuan Sosial   | XXX        |
| Beban Penyusutan Dan Amortisasi                                | XXX        |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih                          | XXX        |
| Beban Transfer   | XXX        |
| Beban Lain-Lain  | XXX        |
| <b>JUMLAH BEBAN OPERASIONAL</b>                                | <b>XXX</b> |
| <b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>         | <b>XXX</b> |
| <b>SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR</b>             | <b>XXX</b> |
| Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar                           | XXX        |
| Beban Pelepasan Aset Non Lancar                                | XXX        |
| <b>Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar</b>      | <b>XXX</b> |
| <b>SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b> | <b>XXX</b> |
| Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang               | XXX        |
| Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang                    | XXX        |
| <b>Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian</b>                   |            |



|   |            |
|---|------------|
| <b>Jangka Panjang</b>   | <b>xxx</b> |
| <b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>        | <b>xxx</b> |
| Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya                      | xxx        |
| Beban Dari Kegiatan Non Operasional                                   | xxx        |
| <b>Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b> | <b>xxx</b> |
| <b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL POS LUAR BIASA</b> | <b>xxx</b> |
| Beban Luar Biasa  |            |
| <b>SURPLUS/(DESIFIT) DARI POS LUAR BIASA</b>                          | xxx        |
| <b>SURPLUS/(DEFISIT)-LO</b>   | <b>xxx</b> |

e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

Tabel 10.  
 Format Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016  
 (DALAM RUPIAH)

| URAIAN   | JUMLAH     |
|--|------------|
| 1  | 2          |
| <b>EKUITAS AWAL</b>                              | <b>xxx</b> |
| <b>SURPLUS/DEFISIT- LO</b>                       | <b>xxx</b> |
| <b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN</b>      | <b>xxx</b> |
| <b>AKUNTANSI/ KESALAHAN MENDASAR</b>             | <b>xxx</b> |
| <b>KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS</b> |            |
| Penyesuaian Nilai Aset                           | <b>xxx</b> |
| Koreksi Nilai Persediaan                         | <b>xxx</b> |
| Selisih Revaluasi Aset Tetap                     | <b>xxx</b> |
| Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi           | <b>xxx</b> |
| Koreksi Lain-Lain                                | <b>xxx</b> |
| <b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>                   | <b>xxx</b> |
| <b>KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>                | <b>xxx</b> |
| <b>EKUITAS AKHIR</b>                             | <b>xxx</b> |

f. Laporan Arus Kas

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Kas adalah uang baik yang dipegang secara tunai oleh bendahara maupun yang disimpan pada bank dalam bentuk tabungan/giro. Sedangkan setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Tabel 11.

Format Laporan Arus Kas

PER 31 DESEMBER 2015-2016

(DALAM RUPIAH)

| No | Uraian  | 2015       | 2016       |
|----|---|------------|------------|
| 1  | <b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>                        |            |            |
| 2  | <b>Arus Masuk Kas</b>   |            |            |
| 3  | Penerimaan Pajak Penghasilan                                  | xxx        | xxx        |
| 4  | Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah | xxx        | xxx        |
| 5  | Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Penerimaan                 | xxx        | xxx        |
| 6  | Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan                     | xxx        | xxx        |
| 7  | Penerimaan Cukai  | xxx        | xxx        |
| 8  | Penerimaan Pajak Lainnya                                      | xxx        | xxx        |
| 9  | Penerimaan Bea Masuk  | xxx        | xxx        |
| 10 | Penerimaan Pajak Ekspor                                       | xxx        | xxx        |
| 11 | Penerimaan Sumber Daya Alam                                   | xxx        | xxx        |
| 12 | Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN                   | xxx        | xxx        |
| 13 | Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya                         | xxx        | xxx        |
| 14 | Penerimaan Hibah  | xxx        | xxx        |
| 15 | Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa                         | xxx        | xxx        |
| 16 | <b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 15)</b>                       | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |
| 17 | <b>Arus Keluar Kas</b>  |            |            |
| 18 | Pembayaran Pegawai  | xxx        | xxx        |
| 19 | Pembayaran Barang   | xxx        | xxx        |
| 20 | Pembayaran Bunga  | xxx        | xxx        |
| 21 | Pembayaran Subsidi  | xxx        | xxx        |
| 22 | Pembayaran Bantuan Sosial                                     | xxx        | xxx        |
| 23 | Pembayaran Hibah  | xxx        | xxx        |
| 24 | Pembayaran Lain-lain  | xxx        | xxx        |
| 25 | Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak                              | xxx        | xxx        |
| 26 | Pembayaran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam                   | xxx        | xxx        |
| 27 | Pembayaran Dana Alokasi Umum                                  | xxx        | xxx        |
| 28 | Pembayaran Dana Alokasi Khusus                                | xxx        | xxx        |
| 29 | Pembayaran Dana Otonomi Khusus                                | xxx        | xxx        |
| 30 | Pembayaran Dana Penyesuaian                                   | xxx        | xxx        |
| 31 | Pembayaran Kejadian Luar Biasa                                | xxx        | xxx        |
| 32 | <b>Jumlah Arus Keluar Kas (18 s/d 31)</b>                     | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |
| 33 | <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 32)</b>       |            |            |
| 34 | <b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>                      |            |            |

|    |   |            |            |
|----|---|------------|------------|
| 35 | <b>Arus Masuk Kas</b>                                     |            |            |
| 36 | Penjualan atas Tanah                                      |            |            |
| 37 | Penjualan atas Peralatan dan Mesin                        | xxx        | xxx        |
| 38 | Penjualan atas Gedung dan Bangunan                        | xxx        | xxx        |
| 39 | Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan                | xxx        | xxx        |
| 40 | Penjualan Aset Tetap Lainnya                              | xxx        | xxx        |
| 41 | Penjualan Aset Lainnya                                    | xxx        | xxx        |
| 42 | Penerimaan dari Divestasi                                 | xxx        | xxx        |
| 43 | Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen               | xxx        | xxx        |
| 44 | <b>Jumlah Arus Masuk Kas (36 s/d 43)</b>                  | xxx        | xxx        |
| 45 | <b>Arus Keluar Kas</b>                                    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |
| 46 | Perolehan Tanah   |            |            |
| 47 | Perolehan Peralatan dan Mesin                             | xxx        | xxx        |
| 48 | Perolehan Gedung dan Bangunan                             | xxx        | xxx        |
| 49 | Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan                     | xxx        | xxx        |
| 50 | Perolehan Aset Tetap Lainnya                              | xxx        | xxx        |
| 51 | Perolehan Aset Lainnya                                    | xxx        | xxx        |
| 52 | Pengeluaran Penyertaan Modal Negara                       | xxx        | xxx        |
| 53 | Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen              | xxx        | xxx        |
| 54 | <b>Jumlah Arus Keluar Kas (46 s/d 53)</b>                 | xxx        | xxx        |
| 55 | <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (44 - 54)</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |
| 56 | <b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>                  |            |            |
| 57 | <b>Arus Masuk Kas</b>                                     | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |
| 58 | Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan       |            |            |
| 59 | Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi               | xxx        | xxx        |
| 60 | Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya                | xxx        | xxx        |
| 61 | Penerimaan Pinjaman Luar Negeri                           | xxx        | xxx        |
| 62 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Daerah                 | xxx        | xxx        |
| 63 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara      | xxx        | xxx        |
| 64 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah      | xxx        | xxx        |
| 65 | <b>Jumlah Arus Masuk Kas (58 s/d 64)</b>                  | xxx        | xxx        |
| 66 | <b>Arus Keluar Kas</b>                                    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |
| 67 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan |            |            |
| 68 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi         | xxx        | xxx        |
| 69 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya          | xxx        | xxx        |
| 70 | Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri                     | xxx        | xxx        |
| 71 | Pemberian Pinjaman kepada Daerah                          | xxx        | xxx        |
| 72 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara               | xxx        | xxx        |
| 73 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah               | xxx        | xxx        |

|    |  |            |            |
|----|--|------------|------------|
| 74 | <b>Jumlah Arus Keluar Kas (67 s/d 73)</b>                                    | xxx        | xxx        |
| 75 | <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan<br/>(65 - 74)</b>                | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |
| 76 | <b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>                                   | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |
| 77 | <b>Arus Masuk Kas</b>  |            |            |
| 78 | Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)                                    |            |            |
| 79 | Kiriman Uang Masuk   | xxx        | xxx        |
| 80 | <b>Jumlah Arus Masuk Kas (78 s/d 79)</b>                                     | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |
| 81 | <b>Arus Keluar Kas</b>   | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |
| 82 | Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)                                   |            |            |
| 83 | Kiriman Uang Keluar  | xxx        | xxx        |
| 84 | <b>Jumlah Arus Keluar Kas (82 s/d 83)</b>                                    | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |
| 85 | <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris<br/>(80 - 84)</b>              | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |
| 86 | <b>Kenaikan/Penurunan Kas (33+55+75+85)</b>                                  | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |
| 87 | <b>Saldo Awal Kas di BUN &amp; Kas di<br/>Bendahara Pengeluaran</b>          | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |
| 88 | <b>Saldo Akhir Kas di BUN &amp; Kas di<br/>Bendahara Pengeluaran (86+87)</b> | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |
| 89 | <b>Saldo Akhir Kas di Bendahara<br/>Penerimaan</b>                           | <b>xxx</b> | <b>xxx</b> |

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Tujuan penyajian CaLK adalah untuk meningkatkan transparansi laporan. CaLK meliputi penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LO, LPE, dan Neraca. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan dalam menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

CaLK mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- 2) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- 3) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 4) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 5) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 6) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- 7) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Berbicara mengenai akuntansi berbasis akrual, sebenarnya hanya terletak pada pengakuannya saja. Akuntansi berbasis akrual belum diterima/dibayarkan telah diakui sebagai pendapatan/pengeluaran tetapi rata-rata untuk kantor instansi pemerintahan sudah terjadi transaksi/terbayarkan barulah kemudian di input kedalam aplikasi basis akrual (SAIBA). Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan akuntansi berbasis kas. Hanya saja untuk basis akrual lebih spesifik, lebih lengkap, dan memudahkan untuk para pengguna aplikasi karena data yang dihasilkan merupakan data yang lebih valid. Kata valid disini diartikan bahwa datanya benar-benar menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Bukan hanya itu dalam aplikasi basis akrual sudah tersedia akun-akun tersendiri dan penginputannya tinggal disesuaikan dengan akun-akun yang tersedia dalam aplikasi tersebut.



## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar telah menerapkan dan melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual.
2. Penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, dilakukan secara komputerisasi berjalan dengan baik dan lancar. Adapun sistem akuntansi yang digunakan yaitu aplikasi SAIBA telah digunakan dan dipakai secara maksimal sesuai dengan tujuan akhirnya yaitu pelaporan keuangan berbasis akrual.
3. Laporan Keuangan yang dihasilkan dengan basis akrual memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan, yaitu dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif, tidak hanya dalam capaian realisasi anggaran namun juga data yang dihasilkan merupakan data yang valid artinya datanya benar-benar menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka beberapa saran dari peneliti yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang telah berjalan sejak tahun 2015, disarankan kepada kantor otoritas pelabuhan utama makassar khususnya sub bagian keuangan yaitu perlu adanya upaya akselerasi penyebar luasan informasi tentang sistem informasi akuntansi berbasis akrual kepada seluruh pegawai sub keuangan sehingga nantinya bukan hanya satu atau dua orang saja yang mengetahui dan mampu menjalankan sistem/aplikasi tersebut namun seluruh pegawai sub bagian keuangan.
2. Selain itu diperlukan adanya pengembangan atas pemahaman akan setiap sistem yang digunakan atau diterapkan pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar melalui proses pelatihan/diklat/bimtek agar dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan bukan hanya pada sub bagian keuangan tetapi juga pada bagian lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2014. *Modul Bimbingan Teknis Implementasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual Tingkat Kantor Satker di Lingkungan Kementerian Perhubungan*. Jakarta : Kementerian Perhubungan RI.
- Anggi Rizkianci. 2010. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Keayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau*. Jurnal Umrah, hal 1-25.
- Asfiansyah, Ahdony. 2015. *Strategi Implementasi Akuntansi Akrual Pada Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota "S")*. Jurnal NeO-Bis, Vol. 9, No. 1, hal.1-19.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta : Erlangga.
- Ida Najati, dkk. 2016. *Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual : Pengujian Determinan Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga*. Jurnal Akuntansi Universitas Jember, Vol. 14, No. 1, hal.1-18.
- IKAPI. 2009. *Standar Akuntansi Pemerintahan : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005*. Bandung : Fokusmedia.
- KSAP. 2007. *Buku Peraturan : Buletin Teknis Nomor 01 Tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat*. Jakarta : KSAP.
- KSAP. 2012. *Standar Akuntansi Pemerintahan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010*. Jakarta : Salemba Empat.
- Langelo, Friska, dkk. 2015. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung*. Jurnal EMBA, ISSN 2303-1174 Vol. 3, No. 1, hal. 1-8.
- Lilina Novianty Sari. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bintan*. Jurnal Umrah, hal 1-25.

- Madjid, Fadhilah. 2016. *Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Di Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros)*. Skripsi. Makassar : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Mahsun, dkk. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Cetakan Kelima. Yogyakarta : Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi UGM.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Cetakan Kesatu. Bandung : PT Refika Aditama.
- Nunuy Nur Afiah. 2010. *Akuntansi Pemerintahan : Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Nordiawan, Deddi, dkk. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Untuk SKPD*. Cetakan Kesatu. Bandung : Alfabeta.

## RIWAYAT HIDUP



**Mutmainna**, lahir di Lacio pada tanggal 14 Oktober 1994, penulis adalah anak kelima dari tujuh bersaudara, buah kasih dari ayahanda Muh. Sabir (almarhum) dan ibunda Naima. Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2001 di SDN 2 Belawae Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang dan tamat pada tahun 2007.

Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Campalagian Polewali Mandar dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun 2010, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di MAN Polman Kabupaten Polewali Mandar dan berhasil lulus pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis diterima melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Makassar Program Strata Satu (S1).

*Lampiran-lampiran*

---

Lampiran 1

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

| Variabel                           | Sub Variabel   | Indikator  |
|------------------------------------|----------------|--|
| Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua | Aplikasi SAIBA | Penerapan Aplikasi SAIBA<br>Sistem akuntansi terkomputerisasi<br>SDM Akuntansi |

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

| Variabel                           | Sub Variabel  | Indikator   |
|------------------------------------|---------------|---|
| Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua | SDM Akuntansi | Telah melakukan pelatihan<br>Sudah memiliki keterampilan dan keahlian |

Lampiran 2

Checklist Observasi

Petunjuk : Beri tanda checklist ( ) pada kolom yang telah disediakan terhadap hasil pengamatan sesuai dengan option jawaban :

| No | Variabel   | Implementasi |             |
|----|--|--------------|-------------|
|    |  | Baik         | Kurang Baik |
| 1. | Bagaimana infrastruktur jaringan pada kantor OP, apakah bisa dikategorikan baik ?  |              |             |
| 2. | Bagaimana infrastruktur teknologi informasi yang tersedia, apakah memungkinkan untuk menerapkan basis akrual ?   |              |             |
| 3. | Sejauhmana sistem akuntansi komputersasi yang digunakan, perihal penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ? |              |             |
| 4. | Sejauhmana penggunaan aplikasi yang digunakan untuk mengelolah keuangan pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ?  |              |             |
| 5. | Sejauhmana proses akuntansi dalam mengerjakan laporan keuangan sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan ?  |              |             |
| 6. | Sampai saat ini sejauhmana tingkat pemahaman pegawai sub bagian keuangan mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual ?  |              |             |
| 7. | Bagaimana partisipasi yang dilakukan oleh pegawai sub bagian keuangan mengenai penggunaan aplikasi berbasis akrual ?   |              |             |
| 8. | Bagaimana proses penyusunan laporan keuangan yang saat ini dilakukan, apakah merasa terbantu dengan adanya penerapan akuntansi berbasis akrual ?                                       |              |             |
| 9. | Sejauhmana tingkat pelatihan yang telah dilakukan oleh pegawai mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual khususnya penggunaan aplikasi SAIBA ?                                      |              |             |



|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
| 10. | Bagaimana tingkat kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pegawai sub bagian keuangan dalam mengoperasikan aplikasi SAIBA, sudah sejalan dengan prosedur yang ada ? |  |  |
|-----|---|--|--|

### Pedoman Wawancara

Pertanyaan wawancara :

1. Apakah pegawai sub bagian keuangan dalam mengerjakan proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi ?  
Jawaban : .....
2. Apakah seluruh pegawai sub bagian keuangan diwajibkan untuk mampu mengoperasikan jenis aplikasi ter komputerisasi pada Kantor OP ?  
Jawaban : .....
3. Apakah pegawai sub bagian keuangan sudah mengetahui betul mengenai basis akrual apa yang di terapkan pada kantor OP ?  
Jawaban : .....
4. Ada berapa aplikasi yang gunakan untuk mengelolah keuangan pada kantor otoritas pelabuhan utama Makassar ?  
Jawaban : .....
5. Dalam penggunaan aplikasi yang dikatakan sebelumnya, apakah pegawai sub bagian keuangan mengetahui aplikasi-aplikasi apa yang dimaksud tersebut ?  
Jawaban : .....
6. Apa perbedaan aplikasi basis akrual yang diterapkan saat ini dengan aplikasi yang diterapkan sebelumnya ?  
Jawaban : .....
7. Apakah pegawai sub bagian keuangan sudah tahu dan bisa membedakan antara akuntansi konvensional, akuntansi berbasis kas, akuntansi berbasis akrual ?  
Jawaban : .....

8. Apakah pegawai sub bagian keuangan telah mengikuti pelatihan khusus dalam mengoprasian aplikasi SAIBA ?

Jawaban : .....

9. Apakah pegawai sub bagian keuangan sudah memiliki keterampilan dan keahlian dalam mengoprasikan aplikasi SAIBA ?

Jawaban : .....

10. Apakah sub bagian keuangan merasa terbantu dengan adanya penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA ?

Jawaban : .....

Lampiran 3

Hasil Observasi

Petunjuk : Beri tanda checklist ( ) pada kolom yang telah disediakan terhadap hasil pengamatan sesuai dengan option jawaban :

| No  | Variabel   | Implementasi |             |
|-----|--|--------------|-------------|
|     |  | Baik         | Kurang Baik |
| 1.  | Bagaimana infrastruktur jaringan pada kantor OP, apakah bisa dikategorikan baik ?  |              |             |
| 2.  | Bagaimana infrastruktur teknologi informasi yang tersedia, apakah memungkinkan untuk menerapkan basis akrual ?   |              |             |
| 3.  | Sejauhmana sistem komputersasi yang digunakan, perihal penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ? |              |             |
| 4.  | Sejauhmana penggunaan aplikasi yang digunakan untuk mengelolah keuangan pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ?  |              |             |
| 5.. | Sejauhmana proses akuntansi dalam mengerjakan laporan keuangan sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan ?  |              |             |
| 6.  | Sampai saat ini sejauhmana tingkat pemahaman pegawai sub bagian keuangan mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual ?  |              |             |
| 7.  | Bagaimana partisipasi yang dilakukan oleh pegawai sub bagian keuangan mengenai penggunaan aplikasi berbasis akrual ?   |              |             |
| 8.  | Bagaimana proses penyusunan laporan keuangan yang saat ini dilakukan, apakah merasa terbantu dengan adanya penerapan akuntansi berbasis akrual ?                             |              |             |
| 9.  | Sejauhmana tingkat pelatihan yang telah dilakukan oleh pegawai mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual khususnya penggunaan aplikasi SAIBA ?                            |              |             |
| 10. | Bagaimana tingkat kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pegawai sub bagian keuangan dalam mengoprasikan aplikasi SAIBA, sudah sejalan dengan prosedur yang ada ?         |              |             |

#### Lampiran 4

| Transkrip Wawancara antara Peneliti (Mu) dengan Informan (An)<br>Hari Kamis Tanggal 04 Mei 2017  |
|--|
| Mu : <i>Selamat siang pak maaf mengganggu waktunya sebentar ?</i>  |
| An : Siang, iya ada apa yah ?  |
| Mu : <i>Saya Mutmainna mahasiswa unismuh yang sedang melakukan penelitian di sini membutuhkan informasi dari bapak terkait penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA pada kantor ini pak?</i>  |
| An : oh iya, informasi yang seperti apa ya ?   |
| Mu : <i>Begini pak, apakah pegawai pada kantor ini dalam mengerjakan proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara terkomputerisasi ?</i>   |
| An : Iya, dilakukan secara komputerisasi.  |
| Mu : <i>Terus pak, proses dari awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan pasti melalui beberapa tahap. Bisa bapak jelaskan secara singkat saja ?</i>  |
| An : Tahap-tahap dalam proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan yaitu dimulai dari transaksi. Untuk laporan transaksi itu diambil dari data SPM atau realisasi SP2D tapi sebelum itu data SPM memiliki dokumen-dokumen kemudian dibuatkan SPM setelah dibuatkan SPM dimasukkan ke KPPN. KPPN mengeluarkan SP2D dasar SP2D itulah dibuat laporan keuangan yang di input kedalam aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual). |
| Mu : <i>Apakah seluruh pegawai sub bagian keuangan diwajibkan untuk mampu mengoperasikan semua jenis aplikasi terkomputerisasi pada Kantor Otoritas Pelabuhan ?</i>  |
| An : Khusus di keuangan atau gimana ?  |

Mu : *Di keuangan pak.*

An : Kalau dikeuangan semua wajib tahu, akan tetapi dalam penggunaan komputerisasi di sesuaikan dengan tupoksi mereka. Apabila aplikasi komputerisasi yang berkaitan dengan pelaporan berarti yang menangani pelaporan dan memegang aplikasi akuntansi wajib tahu mengoprasikannya. Kalau berkaitan dengan bendahara berarti aplikasi yang SASnya penerima khusus penerima yang harus tahu mengeprasikan aplikasi tersebut. Tidak secara keseluruhan pegawai harus mahir mengoprasikan aplikasi itu, anggaplah dari pegawai keuangannya 11 orang kemudian ada sekitar 10 aplikasi tidak semua yang pegang mengetahui keseluruhan aplikasi itu karena spesifik masing-masing sesuai dengan tupoksi. Contohnya BMN, berarti SIMAK-BMN harus mutlak tahu. Kami bisa tahu namun tidak diharuskan sebenarnya lebih bagus lagi kalau tahu karena kan sudah ter tupoksi artinya masing-masing pegawai memiliki tanggung jawab masing-masing makanya ada uraian tugas.

Mu : *Kalau bapak sendiri ?*

An : Saya menggunakan aplikasi SAIBA karena berhubungan dengan tupoksi saya dan juga E-monitoring karena berhubungan dengan tupoksi saya juga. Contohnya SAIBA saya bertanggung jawab penuh dengan pelaporan SAIBA.

Mu : *Kalau begitu, apakah bapak tidak kewalahan untuk mengelola aplikasi itu seorang diri*

An : Bila ditanya mengenai kewalahan atau tidak sebenarnya itu kembali ke personal masing-masing dan juga kenapa kita kewalahan karena itu sudah menjadi tugas selain tergantung bagaimana kita menyikapinya tidak bisa dipungkiri dalam bekerja pasti ada kendala/masalah akan tetapi masalah bukanlah sesuatu yang harus dihindari pasti ada jalan/solusi kalau berbicara tentang beban sebenarnya itu bukan beban karena itu sudah menjadi tupoksi dan tanggung jawab kita.

Mu : *Ada berapa aplikasi yang gunakan untuk mengelolah keuangan pada kantor otoritas pelabuhan utama Makassar ?*

|  |
|--|
| <p>An : Untuk pelaporan ada banyak aplikasi, baru membuat penganggaran sudah ada namanya yaitu aplikasi RKAKL (Rencana Kerja Anggaran Lembaga/Kementerian) aplikasi saat penyusunan anggaran. Aplikasi anggaran pengeluaran namanya SAS (Sistem Akuntansi Satker) kemudian di SAS ada bendahara pengeluaran dan bendahara penerima ada SAS SPM. Ada SPAN selain itu ada juga aplikasi BMN yaitu SIMAK-BMN, ada aplikasi persediaan, dipelaporan ada SAIBA, sistem E-monitoring (online ke kementerian keuangan) sistem E-monitoring ada tiga, diantaranya : sistem E-monitoring pertanggung jawaban dokumen pilihan, SMART ke kementerian keuangan dan PP39 yang tahun 2016 untuk pelaporan ke Badan perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Khusus aplikasi pembuatan gaji namanya aplikasi GPP.</p> |
| <p>Mu : <i>Dalam penggunaan aplikasi yang dikatakan sebelumnya, apakah pegawai sub bagian keuangan mengetahui aplikasi-aplikasi apa yang dimaksud tersebut ?</i></p>   |
| <p>An : Iya, kami sudah tahu sebab aplikasi itu kami yang kelola dan kami tahu betul aplikasi yang dikatakan sebelumnya.</p>   |
| <p>Mu : <i>Apakah pegawai sub bagian keuangan sudah mengetahui betul mengenai basis akrual apa yang diterapkan pada kantor OP ?</i></p>  |
| <p>An : Untuk pegawai keuangan mungkin secara pintas tahu bahwa sekarang kita sudah menerapkan akuntansi basis akrual bukan basis kas tapi secara mendetail mereka tidak tahu karena bukan mereka yang memegang aplikasinya kemungkinan yang mengetahui itu yang memegang pelaporan.</p>   |
| <p>Mu : <i>Apa perbedaan aplikasi basis akrual yang diterapkan saat ini dengan aplikasi yang diterapkan sebelumnya ?</i></p>   |
| <p>An : Untuk penerapan aplikasi. Basis kas artinya saat transaksi uang keluar baru diakui sebagai laporan. Sedangkan basis akrual peristiwa/kejadian baru saja terjadi sudah di akui sebagai pendapatan atau pengeluaran walaupun uang belum diterima/dibayar. Contohnya beban listrik kita sudah pakai tapi belum bayar itu sudah diakui sudah bisa di buat laporan sudah masuk biaya.</p>   |

|   |
|---|
| <p>Mu : <i>Apakah pegawai sub bagian keuangan sudah tahu dan bisa membedakan antara akuntansi konvensional, akuntansi berbasis kas, akuntansi berbasis akrual ?</i></p>   |
| <p>An : Iya. Namun untuk secara keseluruhan, ada yang tahu ada yang tidak khusus untuk pelaporan sudah tentu tahu membedakan ketiga. Yang mana basis kas dan yang mana basis akrul. Disinilah peran pemerintah menerapkan basis akrual supaya tidak terlalu membebankan diakhir tahun. Basis akrual artinya datanya sudah valid, contohnya basis kas pemakai listrik untuk bulan ini sudah mau diakui tetapi belum dibukukan nanti keluar uang kas baru diakui sebagai pengeluaran.</p> |
| <p>Mu : <i>Apakah pegawai sub bagian keuangan telah mengikuti pelatihan khusus dalam mengoprasikan aplikasi SAIBA ?</i></p>   |
| <p>An : Iya. Ada diklat pelatihan khususnya.</p>  |
| <p>Mu : <i>Sudah berapa kali bapak ikut diklat/pelatihan itu ?</i></p>  |
| <p>An : Diklat khusus di Makassar satu kali, kemudian diklat yang di adakan oleh perbendaharaan kurang lebih dua kali untuk secara resminya.</p>  |
| <p>Mu : <i>Bentuk kegiatan dari pelatihan itu seperti apa pak ?</i></p>   |
| <p>An : Sebelum pelatihan kita harus tahu materinya dulu kemudian penerapannya ke aplikasi. Artinya kita harus memahami apa itu SAIBA, apa-apa materi/teori di dalam SAIBA kita pelajari baru kemudian kita simulasi kedalam contoh dan langsung terjun langsung ke aplikasinya. Pada saat proses pelatihan berlangsung kita akan diberikan contoh laporan sebutlah laporan yang dimaksud itu laporan realisasi SPM atau pendapatan (transaksi) baru kita input ke aplikasinya.</p>     |
| <p>Mu : <i>Untuk instruktur nya sendiri pak di datangkan dari pusat atau gimana pak ?</i></p>   |
| <p>An : Ohh iya, instruktur nya langsung dari perbendaharaan keuangan karena aplikasi SAIBA dari kementerian keuangan jadi yang lebih tahu dari orang-orang dari perbendaharaan.</p>  |
| <p>Mu : <i>Apakah pegawai sub bagian keuangan sudah memiliki keterampilan dan keahlian dalam mengoprasikan aplikasi SAIBA ?</i></p>   |

|   |
|---|
| <p>An : Kurang lebih haruslah. Sebenarnya sebelum ikut pelatihan, kita harus tahu mengoperasikan aplikasi SAIBA, bisa dengan belajar sendiri atau belajar dengan teman. Apalagi didukung teknologi saat ini yang semakin canggih selain itu kita juga bisa belajar dengan teman yang lebih tahu tentang aplikasi tersebut.</p>  |
| <p>Mu : <i>Apakah sub bagian keuangan merasa terbantu dengan adanya penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA ?</i></p>   |
| <p>An : Iya, harusnya terbantu karena penerapan basis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA artinya pelaporan memudahkan untuk membuat laporan keuangan.</p>   |
| <p>Mu : <i>Adakah manfaat yang bisa di petik langsung atau bentuk kemudahan yang diperoleh dari penggunaan aplikasi SAIBA ?</i></p>   |
| <p>An : Bentuk kemudahan yang dimaksud adalah apabila kita ingin melihat laporan operasional kita bisa langsung melihatnya secara terinci bahkan jenis-jenis realisasinya LO nya berapa akan nampak secara mendetail. Artinya begini manfaatnya itu kayak kita hanya butuh LO kita bisa cari LO saja munsul semua list di LO, neraca kita bisa langsung melihat neraca, dan LRA selain itu untuk semua laporan sudah memiliki menu transaksinya masing-masing. Ya sangat terbantulah.</p> |
| <p>Mu : <i>Bagaimana infrastruktur jaringan pada kantor ini, apakah bisa dikategorikan baik ?</i></p>   |
| <p>An : Kalau jaringan internetnya untuk sementara bisa dikategorikan baik. Akan tetapi kalau untuk aplikasi SAIBAnyanya sendiri, tanpa jaringan secara online juga bisa di operasikan karena untuk pembuatan laporan keuangannya dilakukan secara komputerisasi dan bukan online. Kecuali pelaporan e-monitoring memang infranstruktur itulah yang dibutuhkan karena berbasis web/internet.</p>  |
| <p>Mu : <i>Bagaimana infrastruktur teknologi informasi yang tersedia, apakah memungkinkan untuk menerapkan basis akrual ?</i></p>   |
| <p>An : Untuk teknologi informasi, selama komputernya dalam keadaan baik maka bisa dikatakan baik. Untuk yang satu ini untuk tergantung pada komputernya, kalau komputernya baik maka bisa bisa dikatakan baik.</p>   |



Untuk aplikasi SAIBA di instal manual di komputer dan tidak ter-link ke web/internet. Aplikasi saiba itu datangnya dari Kementerian melalui KPPN/Perbendaharaan karena pertanggung jawaban kita kan langsung ke Kementerian melalui KPPN.

*Mu : Sejauhmana sistem akuntansi komputersasi yang digunakan, perihal penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ?*

An : Selama komputernya bagus, SDM nya bisa mengerti mengolah data itu maka bisa dikatakan baik. Sementara ini tidak ada kendala yang berarti.

*Mu : Sejauhmana penggunaan aplikasi yang digunakan untuk mengelolah keuangan pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ?*

An : Untuk aplikasinya pastilah dikatakan baik. Setiap aplikasikan masing-masing punya kebutuhan begitu pula dengan SAIBA kebutuhan untuk membuat pelaporan. Hasil dari masing-masing penggunaan aplikasi ada. Karena sampai saat ini saya belum melihat bahwa hasil laporan dari aplikasi ini memiliki kendala yang berarti baik itu SAIBA, SIMAK, SAS maupun aplikasi lainnya.

*Mu : Sampai saat ini sejauhmana tingkat pemahaman pegawai sub bagian keuangan mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual ?*

An: Kalau sampai saat ini proses penerapan akuntansi berbasis akrual memang berjalan lancar.

*Mu : Bagaimana partisipasi yang dilakukan oleh pegawai sub bagian keuangan mengenai penggunaan aplikasi berbasis akrual ?*

An : Kami sudah pakai secara full karena kami sudah memakai basis akrual karena kalau mau kembali menggunakan basis kas sudah tidak ada aplikasi yang menggunakan aplikasi kas sudah tidak ada.

*Mu : Bagaimana penerapan akuntansi berbasis akrual pada kantor ini pak ?*

|  |
|--|
| An : Untuk penerapan akuntansi berbasis akrual di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, sudah berjalan dengan baik dan lancar.   |
| Mu : <i>Apa bukti kalau memang penerapannya berjalan baik dan lancar, pada kantor ini pak ?</i>  |
| An : Bukti bahwa Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar menerapkan basis akrual yaitu dengan di terapkan/digunakannya aplikasi SAIBA untuk pelaporan keuangan. Aplikasi SAIBA sudah berbasis akrual karena itu merupakan nama aplikasi dari suatu sistem yaitu Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual (SAIBA). |
| Mu : <i>Terima kasih atas informasinya pak, dan maaf karena sudah banyak menyita waktu bapak.</i>  |
| An : Oh Iya tidak apa-apa, silahkan bertanya kalau ada lagi yang ingin ditanyakan.   |
| Mu : <i>Oh iya pak, terima kasih saya rasa ini sudah lebih dari cukup.</i>   |
| An : Iya sama-sama.  |

Transkrip Wawancara Antara Peneliti (Mu) Dengan Informan (Eko)  
Hari Kamis Tanggal 04 Mei 2017

Mu : *Assalamualaikum pak maaf mengganggu waktunya, saya Mutmainna mahasiswa unismuh yang sedang melakukan penelitian di sini terkait penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA pada kantor ini pak.*

Eko : Iya. Ada yang bisa saya bantu ?

Mu : *Begini pak. Ini terkait sistem akuntansi terkomputerisasi ?*

Eko : Ohh... tentang sistem akuntansi. Kalau berbicara tentang itu, memang sistem akuntansi disini dilakukan secara terkomputerisasi.

Mu : *Jadi kalau dilakukan secara komputerisasi berarti dalam mengerjakan proses akuntansi dari awal hingga pembuatan laporan keuangan juga dilakukan secara terkumputerisasi ?*

Eko : Iya. Setiap pembuatan laporan keuangan di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar sudah dilakukan secara komputerisasi dimulai dari awal pencairan dari bendahara di muat kedalam aplikasi SPM, setelah itu keluar SP2D nya tentang pencairan dana kemudian dilaporakan di SAIBA.

Mu : *Apakah seluruh pegawai sub bagian keuangan diwajibkan untuk mampu mengoprasikan jenis aplikasi ter komputerisasi pada Kantor Otoritas Pelabuhan ?*

Eko : Iya, tetapi tergantung dengan tupoksi dan tanggung jawab mereka saja.

Mu : *Apakah pegawai sub bagian keuangan sudah mengetahui betul mengenai basis akrual apa yang di terapkan pada kantor OP ?*

Eko : Sudah tahu. Karena kami yang kelola aplikasinya, kami yang buat laporannya sudah pasti kami tahu bahwa saat ini basis akrual yang di terapkan pada kantor OP Makassar saat ini.

Mu : *Ada berapa aplikasi yang gunakan untuk mengelolah keuangan pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ?*

Eko : Pada kantor ini, aplikasi untuk mengelola keuangan ada 3 jenis, seperti : pengeluaran, penerimaan dan materil. Kalau di pengeluaran aplikasi yang digunakan namanya aplikasi SAS, kemudian di penerimaan menggunakan aplikasi berbasis internet nama aplikasinya SIMPONY, kemudian di bendahara materil menggunakan aplikasi SIMAK-BMN dan persediaan.

Mu : *Dalam penggunaan aplikasi yang dikatakan sebelumnya, apakah pegawai sub bagian keuangan mengetahui aplikasi-aplikasi apa yang dimaksud tersebut ?*

Eko : Iya. Karena setiap pegawai memiliki tupoksinya masing-masing, tidak terlepas dari aplikasi apa yang kita tangani yang tentunya menjadi tanggung jawab kita sebagai operator.

Mu : *Apa perbedaan aplikasi basis akrual yang diterapkan saat ini dengan aplikasi yang diterapkan sebelumnya ?*

Eko : Aplikasi berbasis akrual itu adalah aplikasi mengakui seluruh entitas pelaporan keuangan termasuk di dalamnya piutang, atau ada pelaporan yang akan masuk tapi pada saat ini belum masuk itu sudah diakui secara akrual. Sedangkan basis kas itu mengakui apa yang ada pada saat itu, itulah yang di laporkan.

Mu : *Apakah pegawai sub bagian keuangan sudah tahu dan bisa membedakan antara akuntansi konvensional, akuntansi berbasis kas, akuntansi berbasis akrual ?*

Eko : Iya. Karena rata-rata latar belakang pendidikan kami disini dari ekonomi. Kalau bicara personal saya tahu akan tetapi kalau untuk keseluruhan pegawai saya tidak tahu, apakah mereka bisa membedakannya atau tidak. Namun semestinya tahu membedakan ketiga hal tersebut, karena kita disini bergerak di bidang keuangan.

Mu : *Apakah pegawai sub bagian keuangan telah mengikuti pelatihan khusus dalam mengoprasian aplikasi SAIBA ?*

|   |
|---|
| Eko : Iya. Kalau saya sudah tiga kali mengikuti diklat (Dimtek). Diklatnya sendiri pernah diadakan oleh instansi kita sendiri, selain itu pernah juga diadakan oleh keuangan.   |
| Mu : <i>Apakah pegawai sub bagian keuangan sudah memiliki keterampilan dan keahlian dalam mengoprasikan aplikasi SAIBA ?</i>  |
| Eko : Mengenai keterampilan dan keahlian ya, tentu saja kami sudah memiliki keduanya. Sebab kita disini sudah ikut serta dalam pelatihan beberapa kali selain itu berbekal dari aplikasi sebelumnya diterapkan (aplikasi SAKPA) yang pengoprasiaannya tidak jauh berbeda dengan aplikasi yang saat diterapkan (aplikasi SAIBA). |
| Mu : <i>Apakah sub bagian keuangan merasa terbantu dengan adanya penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA ?</i>  |
| Eko : Iya merasa terbantu sekali. Sebab kita bisa mengetahui apa-apa saja entitas yang sudah menjadi hak kita walaupun belum kita terima contohnya piutang adalah pengembalian belanja.   |
| Mu : <i>Terima kasih atas informasinya pak, dan maaf karena sudah banyak menyita waktu bapak.</i>   |
| Eko : Oh Iya tidak apa-apa, sempat masih ada yang ingin ditanyakan.   |
| Mu : <i>Terima kasih, saya rasa ini sudah lebih dari cukup.</i>   |
| Eko : Sama-sama.  |